



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KELAS IB



LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Tahun 2020

SK KETUA PA MUARA ENIM
NOMOR W6-A5/1507/OT.01.2/XII/2020
TANGGAL 15 DESEMBER 2020

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2020



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

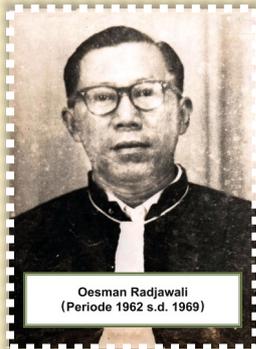
Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No. 1,
Muara Enim, Kode Pos - 31312
Telepon : 0734 - 7420107

Email : pamuaraenim@gmail.com
Web : www.pa-muaraenim.go.id
Fax : 0734 - 7420108

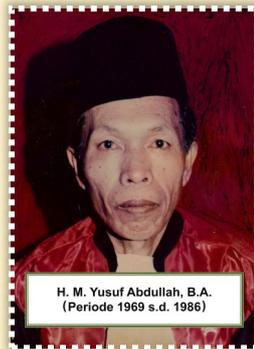


Ketua Sebelumnya

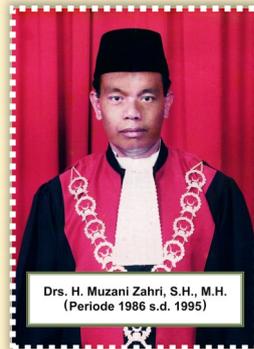
dari Tahun 1962 sampai Sekarang



Oesman Radjawali
(Periode 1962 s.d. 1969)



H. M. Yusuf Abdullah, B.A.
(Periode 1969 s.d. 1986)



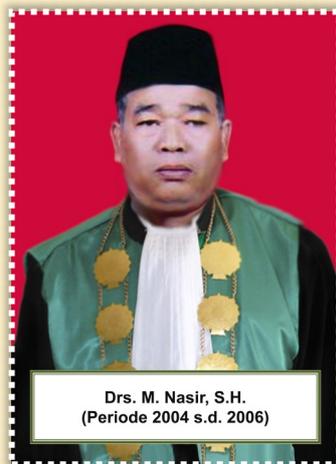
Drs. H. Muzani Zahri, S.H., M.H.
(Periode 1986 s.d. 1995)



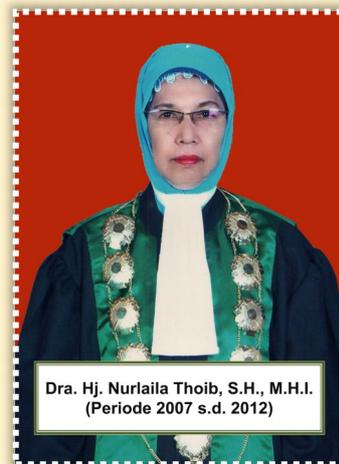
Drs. H. M. Syazili Mathir, S.H.
(Periode 1995 s.d. 2002)



Drs. Ismail Fauzi, S.H.
Periode 2002 s.d. 2004



Drs. M. Nasir, S.H.
(Periode 2004 s.d. 2006)



Dra. Hj. Nurlaila Thoib, S.H., M.H.I.
(Periode 2007 s.d. 2012)



Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
(Periode 2014 s.d. 2016)



Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.
(Periode 2016 sd Mar 2020)



Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.
(Periode Mar 2020 sd Agu 2020)



Drs. Husaini, S.H., M.H.
(Periode Agu 2020 sd Sekarang)



Visi dan Misi

VISI

“ Mewujudkan Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung ”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim



Profil Ketua

KETUA PA. MUARA ENIM ENIM

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

NIP	: 196812191994031001
Tempat	: Tapak Tuan, 19 Desember 1968
Pendidikan	: Strata 2 (S-2)
Pangkat	: Pembina Utama Muda
Golongan Ruang	: IV/c
Jabatan	: Ketua Pengadilan Agama Muara Enim / Hakim Madya Utama
Tamat	Jenjang Pendidikan
Tahun 1982	: 1. SD Negeri 1 Labuhan Haji
Tahun 1985	: 2. MTs Pesantren Persatuan Islam Bangil
Tahun 1988	: 3. MA Pesantren Persatuan Islam Bangil
Tahun 1993	: 4. S-1 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2004	: 5. S-1 Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh
Tahun 2016	: 6. S-2 Hukum Universitas Muhammadiyah Medan
Masa Jabatan	Jabatan
TMT 18/08/2020	: 1. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
TMT 22/05/2019	: 2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
TMT 07/03/2018	: 3. Hakim Mahkamah Syariah Sigli Kelas IB
TMT 28/08/2013	: 4. Ketua Mahkamah Syariah Kutacane Kelas II
TMT 16/09/2010	: 5. Wakil Ketua Mahkamah Syariah Calah Kelas II
TMT 10/04/1999	: 6. Hakim Makamah Syariah Meulaboh Kelas II
TMT 01/04/1998	: 7. Panitera Makamah Syariah Meulaboh Kelas II
TMT 01/06/1995	: 8. PNS/Calon Hakim Makamah Syariah Meulaboh Kelas II
TMT 01/03/1994	: 9. CPNS/Calon Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh Kelas II



Profil Wakil Ketua

WAKIL KETUA PA. MUARA ENIM ENIM

ISRIZAL ANWAR, S.Ag., M.Hum.

NIP	: 197301061999031006
Tempat	: Bukit Tinggi, 6 Januari 1973
Pendidikan	: Strata 2 (S-2)
Pangkat	: Pembina Tingkat I
Golongan Ruang	: IV/b
Jabatan	: Wakil Ketua PA Muara Enim / Hakim Madya Muda
Tamat	Jenjang Pendidikan
Tahun 1985	: 1. SD Inpres No. 3/77 Bukit Tinggi
Tahun 1988	: 2. MTs Negeri II Bukit Tinggi
Tahun 1991	: 3. MA Negeri Koto Batu Padang Panjang
Tahun 1996	: 4. S-1 Ekonomi Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun 2001	: 5. S-2 Ekonomi STIH Iblam Jakarta
Masa Jabatan	Jabatan
TMT 25/08/2020	: 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB
TMT 27/09/2018	: 2. Ketua Pengadilan Agama Painan Kelas II
TMT 22/08/2016	: 3. Wakil Ketua Pengadilan Agama Painan Kelas II
TMT 19/10/2010	: 4. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Kls II
TMT 06/09/2007	: 5. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kelas II
TMT 27/12/2004	: 6. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA
TMT 02/04/2004	: 7. Jusuta Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA
TMT 01/09/2000	: 8. Jusuta Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA
TMT 01/06/2000	: 9. PNS Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA
TMT 01/03/1999	: 10. CPNS Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA

Profil Hakim

Drs. HUSAINI, M.H.

Wakil Ketua PA. Muara Enim
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda (IV/c)



ISRIZAL ANWAR, S.Ag., M.Hum.

Wakil Ketua PA. Muara Enim
Hakim Madya Muda
Pembina Tingkat I (IV/b)



Hj. SABARIAH, S.Ag., S.H.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Madya Muda
Pembina Tingkat I (IV/b)



H. TAMIM, S.H.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Madya Utama
Pembina Utama Muda (IV/c)



YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Pratama Utama
Penata Tingkat I (III/d)



WERI SISWANTO BAD, S.H.I.

Hakim PA. Muara Enim
Hakim Pratama Madya
Penata (III/c)



Profil Pejabat Struktural



Daftar Isi

I	Ketua Sebelumnya	19	Bab III
II	Visi Misi		Sumber Daya Manusia
III	Profil Ketua	20	Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan / golongan / pendidikan
IV	Profil Wakil Ketua	23	Mutasi
V	Profil Hakim	24	Promosi
VI	Profil Pejabat Struktural	24	Pindah Tugas
VII	Pengantar	24	Pensiun
VIII	Daftar Isi	24	Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)
1	Bab I		
	Pendahuluan		
5	Bab II	26	Bab IV
5	A. Keadaan Perkara		Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi
5	Keadaan Perkara Tingkat Pertama	26	A. Pengelolaan Keuangan
7	Keadaan Perkara Tingkat Banding	32	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
8	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	36	C. Pengelolaan Teknologi Informasi
10	Keadaan Perkara tingkat Peninjauan Kembali	36	Implementasi E-Court
		37	Implementasi SIPP
12	B. Penyelesaian Perkara		
12	Jumlah sisa perkara yang diputus	41	Bab V
12	Jumlah perkara yang diputus tepat waktu		Peningkatan Pelayanan Publik
13	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	41	Akreditasi Penjaminan Mutu
14	Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	45	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	51	Inovasi Pelayanan Publik
15	C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISOPengadilan)	72	Bab VI
15	Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)		Pengawasan
16	Sidang keliling / pelayanan terpadu	75	A. Internal
17	Pelayanan sidang terpadu	78	B. Evaluasi
17	Perkara prodeo (Pembebasan biaya perkara)	80	Bab VII
			Penutup
		80	A. Kesimpulan
		81	B. Rekomendasi

Pengantar

Dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal tersebut, dengan ini Pengadilan Agama Muara Enim telah menyusun Laporan sebagaimana dimaksud.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim merupakan media akuntabilitas kinerja yang ditarget dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja tersebut kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 yang akan menyusul kemudian.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020 dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dilakukan secara lebih baik dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Muara Enim.

Muara Enim, 8 Januari 2021

Ketua,



Drs. Husaini, S.H., M.H.

NIP. 196812191994031001

Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan berakhirnya tahun 2020 ini, maka Pengadilan Agama Muara Enim pun membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Muara Enim pada tahun 2020, sebagai penyelenggara pelayanan publik Pengadilan Agama Muara Enim berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim mengambil kebijaksanaan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yaitu, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam yaitu :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Sadaqoh dan
9. Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Muara Enim membuat Renstra 2020-2024 yang selalu di reviu dengan visi “**Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung**” sedangkan misi Pengadilan Agama Muara Enim, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparat Peradilan Agama Muara Enim yang profesional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam mencapai sasaran strategis, 4 (empat) hal tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparat Mahkamah Agung.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang memiliki wilayah hukum 2 kabupaten yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bab II

A. Keadaan Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Alur Perkara Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	865	865	804	51	10
Perdata Permohonan	0	553	553	540	12	1
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1.418	1.418	1.344	63	11

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020												Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des				
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	40	20	20	5	9	27	37	22	31	23	31	9	274	271	3	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	16	17	15	8	5	13	28	21	24	23	16	0	186	169	12	5
Cerai Gugat	0	99	77	61	27	7	43	96	69	65	62	52	7	665	625	36	4
Harta Bersama	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	2	2	1
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	8	5	206	0	0	5	6	0	8	10	10	0	258	251	7	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	2	1	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	6	3	1	2	0	1	3	1	3	1	3	1	25	22	2	1
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	171	123	304	42	22	89	171	114	124	120	113	17	1.418	1.344	63	11

Pada tahun 2019 tersisa sebanyak 0 perkara, kemudian pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara sebanyak 1.418 perkara, jumlah tersebut **menurun 21,7%** dibandingkan tahun 2019 yang menerima sebanyak 1.811 perkara, dengan demikian jumlah perkara tahun 2020 yang ditangani adalah sebanyak 1.418 perkara. Dari 1.418 perkara yang ditangani pada tahun 2020 tersebut, diputus sebanyak 1.407 perkara, jumlah tersebut **menurun 23,41%** dibandingkan tahun 2019 yang memutus sebanyak 1.837 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 11 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **0,78%** dari jumlah perkara yang ditangani tahun 2020. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara adalah sebesar **99,22%**.

Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	1	8	9	6	0	3
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	8	9	6	0	3

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	2	2	2	0	0
Cerai Gugat	0	4	4	1	0	3
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0

Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	1	2	3	3	0	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	8	9	6	0	3

Pada tahun 2019 tersisa sebanyak 1 perkara banding, kemudian pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara banding sebanyak 8 perkara, jumlah tersebut **meningkat 33%** dibandingkan tahun 2019 yang menerima sebanyak 6 perkara, sehingga jumlah perkara banding tahun 2020 yang ditangani adalah sebanyak 9 perkara. Dari 9 perkara banding yang ditangani pada tahun 2020 tersebut, diputus sebanyak 6 perkara, jumlah tersebut **meningkat 20%** dibandingkan tahun 2019 yang memutus sebanyak 5 perkara, sehingga sisa perkara banding tahun 2020 adalah sebanyak 3 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **33,33%** dari jumlah perkara banding yang ditangani tahun 2020. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara banding adalah sebesar **66,67%**.

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	2	2	0	0	2
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	2	2	0	0	2

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	1	1	0	0	1
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	1	1	0	0	1
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	2	2	0	0	2

Pada tahun 2019 tersisa sebanyak 0 perkara kasasi, kemudian pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara kasasi sebanyak

2 perkara, jumlah tersebut **meningkat 200%** dibandingkan tahun 2019 yang menerima sebanyak 0 perkara, sehingga jumlah perkara kasasi tahun 2020 yang ditangani adalah sebanyak 2 perkara. Dari 2 perkara kasasi yang ditangani pada tahun 2020 tersebut, diputus sebanyak 0 perkara, jumlah tersebut **tetap** dibandingkan tahun 2019 yang memutus sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara kasasi tahun 2020 adalah sebanyak 2 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **100%** dari jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun 2020. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara kasasi adalah sebesar **0%**.

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Perdata Gugatan	0	1	1	0	1	0
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1	1	0	1	0

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2020

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa
Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
Izin Kawin	0	0	0	0	0	0
Dispensasi Kawin	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
Kelalaian atas Kewajiban Sumai / Isteri	0	0	0	0	0	0
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0
Cerai Gugat	0	0	0	0	0	0
Harta Bersama	0	0	0	0	0	0

Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0
Hadhonah	0	0	0	0	0	0
Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
Hak-Hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0
Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0
Perwalian	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0	0	0	0
Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0
Isbat Nikah	0	0	0	0	0	0
Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
Wali Adhal	0	0	0	0	0	0
Kewarisan	0	1	1	0	1	0
Wasiat	0	0	0	0	0	0
Hibah	0	0	0	0	0	0
Wakaf	0	0	0	0	0	0
Shodaqoh	0	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris / Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1	1	0	1	0

Pada tahun 2019 tersisa sebanyak 0 perkara peninjauan kembali, kemudian pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara peninjauan kembali sebanyak 1 perkara, jumlah tersebut **meningkat 100%** dibandingkan tahun 2019 yang menerima sebanyak 0 perkara, sehingga jumlah perkara peninjauan kembali tahun 2020 yang ditangani adalah sebanyak 1 perkara. Dari 1 perkara peninjauan kembali yang ditangani pada tahun 2020 tersebut, putus (cabut) sebanyak 1 perkara, jumlah tersebut **meningkat 100%** dibandingkan tahun 2019 yang memutus sebanyak 0 perkara, sehingga sisa perkara peninjauan kembali tahun 2020 adalah sebanyak 0 perkara lagi, jumlah tersebut sebesar **0%** dari jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani tahun 2020. Dengan demikian

rasio produktivitas penyelesaian perkara peninjauan kembali adalah sebesar **100%**.

B. Penyelesaian Perkara

Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Keadaan sisa perkara tahun 2019 yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan alur perkara dan jenis perkara adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun 2019 yang diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim Berdasarkan Alur Perkara Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa Perkara 2019	Di Putus 2020	Sisa Perkara 2019 Belum Putus
Perdata Gugatan	0	0	0
Perdata Permohonan	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Keadaan perkara tingkat pertama yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Jenis Perkara	Waktu Penyelesaian Perkara (dalam bulan)			Jumlah	Belum Putus
	1 sd 3	3 sd 5	> 5		
Perdata Gugatan	846	7	2	855	10
Perdata permohonan	552	0	0	552	1
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Jumlah	1.398	7	2	1.407	11

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Berdasarkan Alur Perkara Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah Beban	Putus	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
Perdata Gugatan	0	865	865	855	8	847
Perdata Permohonan	0	553	553	552	0	552
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	1.418	1.418	1.407	8	1.399

Keadaan perkara tingkat banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa Perkara Banding Th. 2019	Perkara Banding Th. 2020	Perkara Banding Ditangani	Di Putus Banding	Belum Putus Banding	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
Perdata Gugatan	1	8	9	6	3	2	4
Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1	8	9	6	3	2	4

Keadaan perkara tingkat kasasi yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Alur Perkara	Sisa Perkara Kasasi Th. 2019	Perkara Kasasi Th. 2020	Perkara Kasasi Ditangani	Di Putus Kasasi	Belum Putus Kasasi	Mengajukan Peninjauan Kembali	Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali
Perdata Gugatan	0	2	2	0	2	1*)	2

Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	2	2	0	2	1*)	2

Catatan :

*) Pada tahun 2020 ada 2 perkara kasasi yang terdaftar, 2 perkara kasasi tersebut belum putus hingga akhir tahun 2020, sehingga perkara kasasi masih tersisa 2 perkara pada tahun 2020, dengan demikian karena 2 perkara kasasi tersebut belum putus, maka tidak ada perkara kasasi yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Namun pada tahun 2020 terdapat perkara kasasi tahun 2018 yang di putus tahun 2019, dan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2020. Perkara yang diajukan peninjauan kembali tersebut adalah perkara tahun 2015 dengan nomor 786/Pdt.G/2015/PA.ME.

Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Agama Muara Enim melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Data Penyelesaian Perkara melalui Mediasi pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Gugatan 2020	Jumlah Perkara Gugatan Yang Di Mediasi	Status Keberhasilan Medias		
			Berhasil	Tidak Berhasi	Tidak Dapat Dilaksanakan
Perdata Gugatan	865	113	5	108	0
Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0
Jumlah	865	113	5	108	0

Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak pada Pengadilan Agama Muara Enim melalui diversi sebagaimana tabel berikut :

Tabel Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Diversi pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Posbakum (Satker yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Untuk jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum), Pengadilan Agama Muara Enim tidak mendapat alokasi anggaran dalam DIPA tahun anggaran 2020. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2019, yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Anggaran tersebut diberikan negara untuk jasa konsultasi layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Muara Enim dengan volume 240 jam layanan pada tahun 2019..

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019, anggaran sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat memberikan jasa konsultasi layanan bantuan hukum sebanyak 240 jam layanan selama satu tahun dengan jumlah sebanyak 527 perkara.

Dari anggaran tersebut, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah sesuai dengan Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 240 jam layanan, dimana capain keluaran yang diperoleh pada tahun 2019 adalah

sebesar **100%**, yang didapatkan dari rumus (240 jam layanan : 240 jam layanan x 100%).

Tabel Rekapitulasi Jasa Konsultasi layanan Bantuan Hukum Tahun 2020

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	24.000.000	24.000.000	100%	240	240	100%

Sidang Keliling

Untuk Sidang Keliling (sidang diluar gedung pengadilan), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2020. Anggaran tersebut diberikan negara untuk penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan dengan volume 50 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020, anggaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 50 perkara sidang keliling, dimana anggaran yang ditetapkan adalah untuk menyelesaikan sebanyak 50 Perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah mencapai Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 50 Perkara, dimana capain keluaran yang diperoleh pada tahun 2020 adalah sebesar **100%**, yang didapatkan dari rumus (50 perkara : 50 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Sidang Keliling Tahun 2020

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung	20.000.000	20.000.000	100%	50	50	100%

Pelayanan Sidang Terpadu

Untuk Sidang Terpadu (pelayanan sidang terpadu), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2020. Anggaran tersebut diberikan negara untuk penyelesaian perkara sidang terpadu dengan volume 690 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020, anggaran sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut hanya dapat digunakan menyelesaikan sebanyak 31 perkara sidang terpadu, sehubungan terkendala dengan situasi pandemi Covid-19 meskipun anggaran yang ditetapkan untuk menyelesaikan sebanyak 690 perkara.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) kurang mencapai Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 690 Perkara, dimana capain keluaran yang diperoleh pada tahun 2020 adalah sebesar **4,50%**, yang didapatkan dari rumus (31 perkara : 690 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Sidang Terpadu Tahun 2020

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	25.000.000	25.000.000	100%	690	50	4,50%

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Untuk Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara), Pengadilan Agama Muara Enim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam DIPA tahun anggaran 2020. Anggaran tersebut diberikan negara untuk bantuan pembebasan biaya perkara dengan volume 10 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020, anggaran sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terealisasi secara keseluruhan (**sebesar 100%**), dimana anggaran tersebut dapat menyelesaikan sebanyak 10 perkara prodeo.

Dengan demikian, Realisasi Volume Keluaran (RVK) telah sesuai dengan Target Volume Keluaran (TVK) yang ditetapkan sebanyak 10 Perkara, dimana capaian keluaran yang diperoleh pada tahun 2020 adalah sebesar **100%**, yang didapatkan dari rumus (10 perkara : 10 Perkara x 100%).

Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2020

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Progres (%)	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Progres (%)
Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	4.750.00	4.750.00	100%	10	10	100%

Bab III

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu unsur pokok dalam kegiatan manajemen dan merupakan bagian yang dapat menggerakkan roda administrasi untuk pemberian dukungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Sumber Daya manusia terdiri dari Teknis Yudisial dan Non Teknis berjumlah sebanyak 18 orang/personil dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia Teknis Yudisial

- Ketua : 1 orang
- Wakil Ketua : 1 orang
- Hakim : 4 orang
- Panitera : 1 orang
- Panitera Muda : 2 orang
- Panitera Pengganti : - orang
- Jurusita : 3 orang
- Jurusita Pengganti : - orang

2. Sumberdaya Manusia Non Teknis Yudisial.

- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Sub Bagian : 3 orang
- Staf/Pelaksana/Fungsional : 2 orang

Adapun SDM Teknis Yudisial dan Non Teknis Pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan bagan struktur organisasi dapat dilihat sebagaimana dibawah ini :

Weri Siswanto BAD, S.H.I.	Hakim Pratama Madya	17-12-2018	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Drs. Suratman Hardi	Panitera	30-03-2020	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Syam Ratulangi, S.H.	Sekretaris	01-12-2018	Pembina	IV/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Rendy A, S.H.I.	Panitera Muda Gugatan	23-01-2017	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Firdaus, S.H.I.	Panitera Muda Hukum	30-03-2020	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Yeni Puspita, S.Ag.	Kepala Sub Bagian kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	29-12-2015	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Rahmi Oktaria, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	29-12-2015	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum Islam
Azuardi Rizal, S.S.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	29-03-2019	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Komputer
Kaim Nahrudi, S.H.	Jurusita	30-03-2020	Penata Tingkat I	III/d	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Fanani	Jurusita	21-06-2015	Penata Muda Tingkat I	III/b	SMA
Suprayogi Pamungkas, S.H.	Jurusita	30-03-2020	Penata Muda	III/a	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Zayan Rohanda, S.H.	Staf Pelaksana	07-08-2019	Penata	III/c	S-1 Program Studi Ilmu Hukum
Ary Puspita Yudha, S.T.	Staf Pelaksana	30-12-2015	Penata Muda Tingkat I	III/b	S-1 Program Studi Ilmu Komputer

Dari 18 orang SDM yang ada tersebut, sebanyak 1 orang merupakan golongan III/a (Penata Muda), jumlah tersebut sebesar 5,56% dari jumlah SDM. Sebanyak 2 orang merupakan golongan II/b (Penata Muda Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 11,11% dari jumlah SDM. Sebanyak 6 orang merupakan golongan III/c (Penata), jumlah tersebut sebesar 33,33% dari jumlah SDM. Sebanyak 3 orang merupakan golongan III/d (Penata Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 16,67% dari jumlah SDM. Sebanyak 2 orang

merupakan golongan IV/a (Pembina), jumlah tersebut sebesar 11,11% dari jumlah SDM. Sebanyak 2 orang merupakan golongan IV/b (Pembina Tingkat I), jumlah tersebut sebesar 11,11% dari jumlah SDM. Sebanyak 2 orang merupakan golongan IV/c (Pembina Utama Muda), jumlah tersebut sebesar 11,11% dari jumlah SDM. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Golongan Ruang	Jumlah	Komposisi
IV/e	0	0%
IV/d	0	0%
IV/c	2	11,11%
IV/b	2	11,11%
IV/a	2	11,11%
III/d	3	16,67%
III/c	6	33,33%
III/b	2	11,11%
III/a	1	5,56%
II/d	0	0%
II/c	0	0%
II/a	0	0%
Jumlah	18	100%

Dari 18 orang SDM yang ada tersebut, sebanyak 1 orang memiliki jenjang pendidikan tingkat SMA, jumlah tersebut hanya 5,56% dari jumlah SDM yang ada saat ini. Sedangkan yang memiliki jenjang pendidikan tingkat S-1 jumlahnya sebanyak 15 orang, dimana jumlah tersebut mencapai 83,33% dari jumlah SDM. Kemudian untuk jenjang pendidikan tingkat S-2 adalah sisanya sebanyak 2 orang, jumlah tersebut hanya 11,11% dari jumlah SDM. Adapun komposisi SDM tersebut diuraikan sebagaimana berikut ini :

Tabel Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Komposisi
S-3	0	0 %
S-2	2	11,11 %
S-1 / D-IV	15	83,33 %

D-III	0	0 %
D-II	0	0 %
D-I	0	0 %
SMA	1	5,56 %
SMP	0	0 %
Jumlah	18	100 %

Mutasi

Mutasi bagi Pegawai Negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Selama tahun 2020 SDM Pengadilan Agama Muara Enim mendapat mutasi sebagai berikut :

Tabel Mutasi dan Promosi Hakim Tahun 2020

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Drs. Bakti Ritongah, S.H., M.H	Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekan Baru Kelas IA	Rapim 15 Juli 2020
Isrizal Anwar S.Ag., M.Hum	Ketua Pengadilan Agama Painan Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 15 Juli 2020
Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II	Rapim 24 Juli 2020
Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo Kelas II	Rapim 24 Juli 2020
Yeni Kurniati, S.H.I.	Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kelas II	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 24 Juli 2020
Drs. Suratman Hardi	Panitera Pengadilan Agama Baturaja Kelas IB	Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 13 Feb 2020
Edy Syafiq, S.H	Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Kelas IB	Rapim 13 Feb 2020
Leni Perbriati, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Bungo Kelas II	Rapim 04 Agus 2020

Promosi

Tabel Promosi Pejabat Fungsional Tahun 2020

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
Firdaus, S.H.I.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 13 Feb 2020
Kaim Nahrudin, S.H.I.	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 13 Feb 2020
Suprayogi Pamungkas, S.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB	Rapim 13 Feb 2020

Tabel Promosi Pejabat Struktural Tahun 2020

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
-	-	-	-

Pindah Tugas

Tabel Pindah Tugas Pegawai Tahun 2020

Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
-	-	-	-

Pensiun

Tabel Pensiun Pegawai Tahun 2019

Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	TMT Pensiun	Status Pensiun
-	-	-	-	-

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Pembinaan SDM terhadap tenaga teknis yustisial yang terdiri hakim dan panitera serta jurusita dengan mengikuti pendalaman materi hukum formil dan materiil. Adapun data pelatihan dan pembinaan sebagai berikut :

Tabel Diklat Tenaga Teknis Tahun 2020

Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.	Hakim	Pelatihan Teknis Fungsional Gugatan Sederhana Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum dan Agama Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kundil MA RI	16 Okt sd 22 Okt 2020 dan 26 Okt sd 5 Nov 2020

Tabel Diklat Tenaga Non Teknis Tahun 2020

Nama	Jabatan	Nama Kegiatan	Penyelenggara Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Ary Puspita Yudha, S.T	Bendahara Pengeluaran	Diklat Online Manajemen Risiko	Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kundil MA RI	6 s/d 10 Juli 2020
Azuardi Rizal S.S.I.	Kasubbag PTIP	Diklat Online Video Editing	Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kundil MA RI	14 s/d 18 September 2020
Ary Puspita Yudha, S.T	Bendahara Pengeluaran	Diklat Online Video Editing	Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kundil MA RI	14 s/d 18 September 2020
Nopriyansyah. S.Kom	Honorer	Diklat Online Video Production	Pusdiklat Menpim Balitbang Diklat Kundil MA RI	28 September s/d 02 Oktober 2020

Bab IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Alokasi anggaran Pengadilan Agama Muara Enim memiliki dua macam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yakni DIPA unit organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA- 005.01.2.402282/2020, dan DIPA unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor SP DIPA- 005.04.2.402283/2020. DIPA tersebut disahkan pada tanggal 12 November 2019.

Tabel DIPA 01 Tahun Anggaran 2020

Program	Kegiatan	Output	Anggaran	Volume Keluaran
00501.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	994. Layanan Perkantoran 001 Gaji dan Tunjangan	3.338.631.000	1 Layanan
00501.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	1066.994 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	994. Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.090.145.000	1 Layanan
00501.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dilingkungan Mahkamah Agung	951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	25.000.000	1 Layanan
Jumlah			4.453.776.000	

Tabel DIPA 04 Tahun Anggaran 2020

Program	Kegiatan	Output	Anggaran	Volume Keluaran
00504.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	003 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	4.750.000	10 Perkara
00504.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	004 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	20.000.000	50 Perkara
00504.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1053 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	009 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	25.000.000	690 Perkara
Jumlah			49.750.000	

REVISI ANGGARAN

Tabel Revisi Ke-1 DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 (14 Februari 2020)

Revisi hanya dilakukan pada Halaman III DIPA, yakni rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

Tabel Revisi Ke-2 DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 (2 Juli 2020)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	4.438.856.000	4.428.776.000	10.080.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.100.225.000	1.090.145.000	10.080.000
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Karir dan Hakim Adhoc	100.800.000	90.720.000	10.080.000

Tabel Revisi Ke-3 DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 (28 Agustus 2020)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	4.428.776.000	4.428.776.000	-
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.090.145.000	1.090.145.000	-
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	335.415.000	343.526.000	8.111.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13.145.000	20.256.000	7.111.000
521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	65.000.000	66.000.000	1.000.000
B	Langganan Daya dan Jasa	304.378.000	272.398.000	(31.980.000)
522111	Belanja Langganan Listrik	99.580.000	72.000.000	(27.580.000)

522112	Belanja Langganan Telepon	21.200.000	16.800.000	(4.400.000)
C	Pemeliharaan Kantor	254.672.000	302.581.000	47.909.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	135.720.000	166.800.000	31.080.000
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.952.000	135.781.000	16.829.000
I	Rakernas MA RI	11.440.000	-	(11.440.000)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.440.000	-	(11.440.000)
J	Konsultasi ke KPPN/KPKNL	21.800.000	6.000.000	(15.800.000)
524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	21.800.000	6.000.000	(15.800.000)
K	Belanja Barang Persediaan Darurat Bencana	-	3.200.000	3.200.000
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid 19	-	3.200.000	3.200.000

Tabel Revisi Ke-4 DIPA 01 Tahun Anggaran 2020 (1 Desember 2020)

Kode	Uraian	Sebelum	Sesudah	Kenaikan / Penurunan
1066.994	Layanan Perkantoran	4.428.776.000	4.428.776.000	-
001	Gaji dan Tunjangan	3.338.631.000	3.338.631.000	-
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	888.536.000	1.033.239.000	144.793.000
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	77.279.000	86.527.000	9.248.000
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	23.646.000	27.921.000	4.275.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.724.380.000	1.566.154.000	(158.226.000)
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.090.145.000	1.090.145.000	-
5211119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20.256.000	24.494.000	4.238.000
521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	66.000.000	69.080.000	3.080.000
5211114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	2.400.000	3.000.000	600.000
522111	Belanja Langganan Listrik	72.000.000	63.600.000	(8.400.000)
522112	Belanja Langganan Telepon	16.800.000	16.080.000	(720.000)
522113	Belanja Langganan Air	25.198.000	20.040.000	(5.158.000)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	166.800.000	173.520.000	6.720.000
522141	Belanja Sewa	90.720.000	83.160.000	(7.560.000)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.000.000	35.000.000	(9.000.000)
524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	6.000.000	4.200.000	(1.800.000)

REALISASI ANGGARAN

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 01 Tahun Anggaran 2020

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Keperluan Perkantoran	413.270.000	413.270.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Pengiriman Surat Dinas	3.000.000	2.713.000	90,43%	287.000	9,57%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	45.720.000	45.720.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Barang Operasional Lainnya	24.494.000	24.493.950	100,00%	50	0,00%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	69.080.000	69.079.237	100,00%	763	0,00%
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi covid 19	3.200.000	3.200.000	100,00%	-	0,00%
Belanja Langganan Listrik	63.600.000	61.179.373	96,19%	2.420.627	3,81%
Belanja Langganan Telepon/Internet	16.080.000	15.767.274	98,06%	312.726	1,94%
Belanja Langganan Air	20.040.000	19.360.000	96,61%	680.000	3,39%
Belanja Sewa Rumah Dinas Hakin	83.160.000	82.320.000	98,99%	840.000	1,01%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	173.520.000	173.519.930	100,00%	70	0,00%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.781.000	135.779.515	100,00%	1.485	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000	34.995.555	99,99%	4.445	0,01%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	4.200.000	100,00%	-	0,00%
Jumlah	1.090.145.000	1.089.597.834	99,58%	4.547.166	2,67%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA 01 Tahun Anggaran 2020

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Gaji Pokok PNS	1.033.239.000	1.031.961.100	99,88%	1,257,900	0,12%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	17.008	89,52%	1.992	10,48%
Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS	86.527.000	85.501.760	98,82%	1.025.240	1,18%
Belanja Tunjangan Anak PNS	27.921.000	26.910.726	96,38%	1.010.274	3,62%
Belanja Tunjangan Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00%	-	0%
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.566.154.000	1.411.390.000	90,16%	154.764.000	9,84%
Belanja Tunjangan PPh PNS	303.557.000	164.398.104	54,16%	139.158.896	45,84%
Belanja Tunjangan Beras PNS	60.466.000	53.011.440	87,67%	7.454.560	12,33%
Belanja Uang Makan PNS	211.992.000	154.951.000	73,09%	57.041.000	26,91%
Belanja Tunjangan Umum PNS	12.356.000	5.180.000	41,92%	7.176.000	58,08%
Jumlah	3.338.631.000	2.969.741.138	88,95%	368.889.862	11,05%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA 01 Tahun Anggaran 2020

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	24.960.000	99,84%	40.000	0,16%
Jumlah	25.000.000	24.960.000	99,84%	40.000	0,16%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 04 Tahun Anggaran 2020

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Prodeo)	4.750.000	4.750.000	100%	-	0%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sidang Keliling)	20.000.000	20.000.000	100%	-	0%
Beban Perjalan Dinas Dalam Kota (Sidang Terpadu)	25.000.000	25.000.000	100%	-	0%
Jumlah	49.750.000	49.750.000	100%	-	0%

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Tabel PNBP 402282 (01) Tahun Anggaran 2020

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi pendapatan
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.745.489
	Jumlah	1.745.489

Tabel PNBP 402283 (04) Tahun Anggaran 2020

Kode	Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi pendapatan
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	43.260.000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	82.326.500
	Jumlah	125.586.500

PENGELOLAAN BIAYA PERKARA

Tabel Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Awal	69.120.000	-
Penerimaan	1.619.423.300	-
Biaya Proses/ATK/Pemberkasan*)		72.350.000
Biaya Panggilan		556.440.000
Biaya Penerjemah		0

Biaya Pemberitahuan		156.523.000
Biaya Sita		0
Biaya Pemeriksaan Setempat		13.250.000
Biaya Sumpah		0
Biaya Saksi Ahli		0
Biaya Pengiriman		2.050.000
Biaya Materai		8.448.000
PNBP Biaya Pendaftaran		43.240.000
PNBP Redaksi		14.080.000
PNBP Lain-lain		30.960.000
Pengembalian Sisa Panjar		728.620.800
Biaya Lain-lain		1.600.000
Jumlah	1.688.543.300	1.627.561.800
Saldo Akhir	60.981.500	-
Saldo di Bank	56.777.381	-
Saldo di Brankas	4.204.119	-

Tabel Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal	9.668.500	-	-
Penerimaan	72.350.000	-	-
Pengeluaran	-	77.817.000	-
Saldo Akhir	-	-	4.201.500
Jumlah	82.018.500	77.817.000	4.201.500

Tabel Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal	0	-	-
Penerimaan	5.881.000	-	-
Biaya Materai		0	
Biaya Leges		0	
Biaya Sita Eksekusi		0	
Biaya Juru Sita		450.000	
Biaya Pengumuman Lelang/Iklan		0	
Biaya Juru Lelang		0	
Biaya Lelang		0	
Biaya Saksi		0	
Biaya Pemberitahuan		0	
Biaya Keamanan		0	

Pengembalian Sisa Panjar Eksekusi		0	
PNBP		30.000	
Lain-lain		0	
Jumlah	5.881.000	480.000	
Saldo Akhir	5.881.00	480.000	5.401.000

Tabel Biaya Sita Jaminan/Eksekusi/Lelang

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Saldo Awal	0	-	-
Penerimaan (Uang Konsinyasi dan Panjar Konsinyasi)	0	-	-
Biaya Pelaksanaan Penawaran		0	
Biaya pendaftaran		0	
Biaya Proses/ATK		0	
Redaksi		0	
Materai		0	
Leges		0	
Pengambilan Uang Konsinyasi		0	
Biaya Lain-lain		0	
Jumlah	0	0	
Saldo Akhir	0	0	0

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Gedung

Dalam pembangunan gedung Kantor Pengadilan tidak boleh mengesampingkan ciri khas dari pada gedung kantor yang ada pada bagian depan mempunyai 4 (empat) pilar/ tiang kokoh berdiri tegak menunjukkan kewibawaan, Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Tingkat Banding tempat para Hakim menegakkan hukum dan keadilan merupakan tempat yang terhormat yang harus di jaga kewibawaannya. Oleh karena itu peradilan harus dijaga kehormatan dan kewibawaannya, untuk mencapai derajat ini maka aparat peradilan, Hakim khususnya harus memiliki integritas moral yang tinggi dan tiada cacat celanya dan harus memiliki pula

kemampuan profesional yang dapat diandalkan serta kematangan ilmu intelektual dapat diteladani oleh masyarakat luas.

Disamping itu 4 (Empat) pilar juga mengandung azas proses peradilan yaitu: cepat, sederhana, biaya ringan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang dicita-citakan oleh Undang-undang. Pengadilan Agama Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H., Nomor 1, Desa Kepur, Muara Enim dengan luas bangunan 1.400 M² yang terdiri dari 2 (dua) lantai.

Tabel Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Muara Enim

Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
Ruang Ketua	1	Lantai II
Ruang Wakil Ketua	1	Lantai II
Ruang Hakim	1	Lantai II
Ruang Panitera	1	Lantai II
Ruang Sekretaris	1	Lantai II
Ruang Pertemuan	1	Lantai I
Ruang Sidang	2	Lantai I
Ruang Kepaniteraan	1	Lantai I
Ruang Kesekretariatan	1	Lantai I
Ruang Panmud Hukum	1	Lantai I
Ruang PP dan JS	1	Lantai I
Ruang Mediasi	1	Lantai I
Ruang Pelayanan Terpadu	1	Lantai I
Ruang Tunggu Sidang	1	Lantai I
Ruang Bermain Anak	1	Lantai I
Ruang Laktasi	1	Lantai I
Ruang Medis	1	Lantai I
Ruang Perpustakaan	1	Lantai II
Mushola	1	Lantai I
Gudang	2	Lantai 1 dan Lantai II
Ruang Arsip	1	Lantai II
Ruang Posbakum	1	Lantai I
Ruang Teleconference	1	Lantai I
Toilet Wanita	3	Lantai I
Toilet Pria	2	Lantai I
Pos Satpam	2	Lantai I

Ruang Server/ IT	1	Lantai I
Ruang Rapat	1	Lantai II

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim mendapatkan anggaran diperuntukkan pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, dan halaman kantor sebesar Rp. 173.520.000,- (*seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), dengan realisasi sebesar 100,00 %.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Pemeliharaan Gedung	173.520.000	173.519.930	100,00%	70	0,00%

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengadilan Agama Muara Enim memiliki sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa diantaranya sebagai berikut :

Tabel Sarana/Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana / Prasarana Fasilitas Gedung	Jumlah	Keterangan
Komputer/ Personal Computer	37	27 Kondisi Baik, 10 Kondisi Rusak Berat
Laptop	23	21 Kondisi Baik, 2 Kondisi Rusak Berat
Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	17 Kondisi Baik, 6 Kondisi Rusak Berat
Ac	30	28 Kondisi Baik, 2 Kondisi Rusak Berat
PABX	1	Kondisi Baik
Scanner	1	Kondisi Baik
Faximile	1	Kondisi Baik
Mesin Finger	2	1 Kondisi Baik, 1 Kondisi Rusak Ringan
CCTV	10	Kondisi Baik
Numerator	1	Kondisi Baik
Brandkas	2	1 Kondisi Baik, 1 rusak berat
Filling Cabinet Besi	2	Kondisi Baik
Sice	7	Kondisi Baik
Papan Visual/ Papan Nama	6	Kondisi Baik
Lemari Besi/ Metal	8	Kondisi Baik
Meja Kerja Kayu	100	88 Kondisi Baik, 12 Kondisi Rusak Berat
Kursi Besi/ Metal	197	171 Kondisi Baik, 26 Kondisi Rusak Berat

Kursi Panjang Besi/Metal	17	Kondisi Baik
Kursi Kayu	58	Kondisi Baik
UPS	6	Kondisi Baik
Lemari Kayu	7	Kondisi Baik
Server	2	Kondisi Baik
Rak Server	1	Kondisi Baik

Pengadaan

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020 ada belanja modal sebesar **Rp 25.000.000,-** (*Dua puluh lima juta rupiah*), untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa Dekstop PC sebanyak 2 unit.

Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu tahun anggaran 2020 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2, pc desktop, laptop, printer, ac, dan inventaris lainnya senilai **Rp 135.781.000,-** (*seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.781.000	135.779.515	100%	1.485	0%

Penghapusan

Tidak ada penghapusan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2020.

Kendaraan Dinas

Hingga akhir tahun 2020 jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

Tabel Daftar Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Muara Enim

Nama Kendaraan Dinas	Tahun	Kondisi	Keterangan
Toyota Innova Type E Bensin	2007	Baik	MA <i>Droping</i> Mobil Operasional Panitera
Toyota Innova Type G Bensin	2011	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Sekretaris
Mitsubishi Pajero Solar	2011	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Ketua
Toyota Kijang Standar KF80	2003	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim Mobil Operasional Kantor
Honda Mega Pro	2006	Baik	Motor Operasional Dinas Jabatan
Honda Mega Pro	2006	Baik	Motor Operasional Dinas Jabatan
Supra X 125	2008	Baik	Motor Operasional Dinas Jabatan
Supra X 125	2006	Baik	Motor Operasional Dinas Jabatan

Rumah Dinas

Hingga akhir tahun 2019 jumlah rumah dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

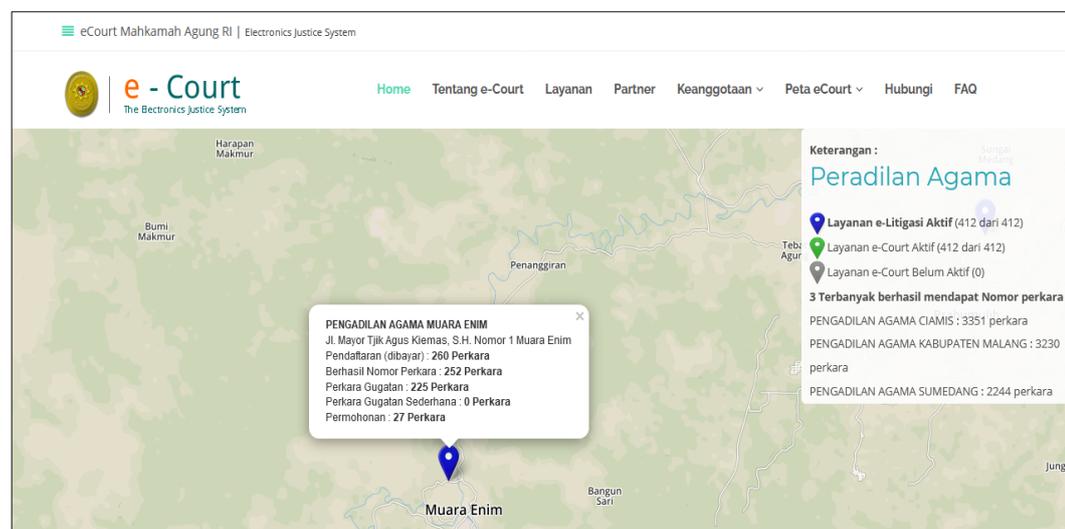
Tabel Daftar Rumah Dinas

Nama Rumah Dinas	Tahun	Kondisi	Keterangan
Rumah Dinas Ketua	2014	Baik	Pinjam Pakai dari Pemkab Muara Enim
Rumah Negara Gol. II Type B Permanen	2009	Baik	Milik Pengadilan Agama Muara Enim

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim

Gambar Peta Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020



Sejak Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 5610/DJA/HM.02.3/XI/2019 tanggal 26 November 2019, tentang Implementasi e-litigation di lingkungan peradilan agama, sebagai penerapan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Agama Muara Enim mengupayakan langkah-langkah yang kongkrit dari tanggal 24 Desember 2019 dan sudah menerima/memproses dan memutus perkara e-court secara biasa maupun e-litigation, serta telah melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk direkap dan di laporkan ke Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama. Secara keseluruhan perkara yang diajukan melalui e-court adalah sebanyak 260 perkara, sedangkan yang bisa terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim berjumlah 252 perkara, yakni gugatan sebanyak 225 perkara, permohonan sebanyak 27 perkara dan gugatan sederhana sebanyak 0 perkara.

Implementasi e-court di Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2020 adalah dengan lampiran sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Daftar Perkara E-Court Tahun 2020

Uraian	Terdaftar	Dicabut	Putus Secara Elektronik	Putus Secara Biasa	Jumlah Putus	Sisa / Masih Dalam proses
Gugatan Online	213	1	8	197	206	7
Permohonan Online	26	0	0	25	25	1
Gugatan Sederhana Online	0	0	0	0	0	0
Jumlah	239	0	8	223	231	8

Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Muara Enim

Rekapitulasi Rapor Penanganan Perkara Peradilan Agama Berdasarkan SIPP Periode 6 November 2020

REKAPITULASI RAPOR PENANGANAN PERKARA PERADILAN AGAMA BERDASAR SIPP PERIODE 6 NOPEMBER 2020																	
B. RAPOR PENANGANAN PERKARATINGKAT PERTAMA																	
3. KATEGORI III (1001-2500 PERKARA)																	
No	Satuan Kerja	DATA										PENILAIAN					
		Ketua	Wakil	Hakim	Kepaniteraan	Beban Perkara (Perkara Sisa Tahun Lalu + Perkara Tahun Ini)	Perkara Putus Tahun Ini	Beban Minutasi (Sisa Minutasi Tahun Lalu + Perkara Putus Tahun Ini)	Minutasi Tahun Ini	Putusan yang belum diupload dari Tahun 2016	Upload Putusan Tahun Ini	Persentase Bobot Proses	Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir	Rangking
1	PA KUALA TUNGKAL	1	1	4	9	1.141	1.047	1.047	1.047	0	1.047	82,235%	96,600%	100,000%	99,542%	98,714%	1
2	PA MUARA ENIM	1	1	4	6	1.301	1.229	1.229	1.229	2	1.227	74,736%	96,111%	100,000%	99,024%	98,378%	2
3	PA SUMBAWA BESAR	1	1	4	19	1.300	1.179	1.179	1.179	18	1.161	72,858%	96,658%	100,000%	98,100%	98,253%	3
4	PA KOTA TASIKMALAYA	1	1	5	10	2430	2.239	2.239	2.239	0	2.239	62,908%	95,373%	100,000%	96,955%	98,109%	4
5	PA PASIR PANGARAIAN	1	1	7	8	1.198	1.053	1.053	1.053	0	1.053	71,455%	94,328%	100,000%	99,012%	97,780%	5

Dari rapsor penanganan perkara berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) periode 6 November 2020 tersebut, Pengadilan Agama muara Enim berada dalam kategori III, yaitu kategori 1001-2500 perkara.

Berdasarkan penilaian pada akhir tahun 2020 yang dirilis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di situs resminya pada tanggal 6 November 2020 tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim berada di posisi kedua dengan nilai kinerja sebesar **98,378%**.

Selama tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan satu kali penghargaan atas hasil kinerja SIPP. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap Pengadilan Agama yang berhasil mempertahankan posisi 5 besar dan 10 besar secara berturut-turut tiap minggu pada masing-masing kategori. Penghargaan tersebut diterima Pengadilan Agama Muara Enim sesuai Surat Dirjen Badilag Nomor 3950/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 27 November 2020 dimana Pengadilan Agama Muara Enim sebagai peringkat pertama di kategori III (1001-2500 perkara).

Daftar Satker Penerima Penghargaan Ranking 5 Besar Berdasarkan Rapor Penanganan Perkara SIPP

Lampiran II
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 3950/DjA.3/HM.00/11/2020
Tanggal : 27 November 2020

**Daftar Satker Tingkat Pertama Rangkang 5 Besar Berturut-turut
Rapor Penanganan Perkara SIPP**

A. Kategori I

No	Satuan Kerja		Kelas
	Pertama	Banding	
1	PA Jember	PTA Surabaya	IA
2	PA Banyuwangi	PTA Surabaya	IA
3	PA Surabaya	PTA Surabaya	IA
4	PA Kabupaten Malang	PTA Surabaya	IA

B. Kategori II

No	Satuan Kerja		Kelas
	Pertama	Banding	
1	PA Lamongan	PTA Surabaya	IA
2	PA Bondowoso	PTA Surabaya	IB

C. Kategori III

No	Satuan Kerja		Kelas
	Pertama	Banding	
1	PA Muara Enim	PTA Palembang	IB
2	PA Sumbawa Besar	PTA Mataram	IB
3	PA Kuala Tungkal	PTA Jambi	II
4	PA Tembilahan	PTA Pekanbaru	II

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim berhasil memutus sebanyak 1.407 perkara. Jumlah tersebut mencapai **99,22%** dari jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2020, yakni 0 perkara sisa tahun 2019 ditambah 1.418 perkara diterima tahun 2020. Hasil tersebut sudah melebihi batas maksimal target sisa perkara sebesar 10%.

Gambar Screen Shoot SIPP Lokal

MONITORING SIPP 4.0.1
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB
REALTIME RASIO PENANGANAN PERKARA TAHUN INI

99.22 %

Tunggakan (Sisa Perkara) : 11
 Sisa Tahun Lalu : 0 | Masuk Tahun Ini : 1418
 Putus Tahun Ini : 1407 | Minutasi Tahun Ini : 1407 | Putus Bulan Ini : 73
 Redaksi Hari Ini : 0 | Putus Hari Ini : 0 | Belum Minutasi : 0
 Perkara Sudah Redaksi Belum Putus
 Perkara Sudah Putus Belum Redaksi

... PERINGATAN ...
 Mohon cek kembali kesesuaian data perkara yang ditangani,
 antara tanggal PUTUS, MINUT dan REDAKSI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Username
 Password
 Login

Hasil Screen Shoot SIPP Lokal Pada Sidang Terakhir Pengadilan Agama Muara Enim

Load Time : 0.0342 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 3.9 MB | Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | Version 4.0.1

Gambar Screen Shoot Halaman Dashboard SIPP MA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
 Mahkamah Agung Republik Indonesia

PA MUARA ENIM
 Tingkat Pertama

Home | Perdata | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Statistik | Peta | Kinerja | Delegasi | Laporan

99.22%
 Penanganan Perkara
 More info

11 Perkara
 Tunggakan Perkara
 More info

4.0.1
 Versi Terakhir Terpasang
 More info

30 Des. 2020
 Sinkronisasi Terakhir
 More info

Statistik Perkara Tahun 2020

INFORMASI

#	Info	Data
1.	Perkara 4 Bulan	0
2.	Perkara 5 Bulan	0
3.	Perkara 6 sampai 12 Bulan	0
4.	Perkara Lebih dari 12 Bulan	0
5.	Putus Belum Minutasi	0
6.		0
7.		0
8.		0

0 | 1.418 | 1.407

Load Time : 0.0020 Sec. | Memory Available: 128M | Memory Usage : 3.59MB | Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016 | Version 4.0.1

Gambar Screen Shoot Halaman Rekapitulasi Data SIPP MA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Mahkamah Agung Republik Indonesia

PA MUARA ENIM
Tingkat Pertama

Home Perdata Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Stafetik Peta Kinerja Delegasi Laporan

REKAPITULASI DATA

Badan Peradilan: Badan Peradilan Agama
 Tingkat Banding: PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
 Pengadilan Tingkat Pertama: Pilih Nama Pengadilan

Pencarian:

No	Pengadilan	Sisa Lalu	Masuk	Minutasi	Sisa	Penangan Perkara	Yeni Terpasang	Sinkronisasi
1	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	3	720	711	12	98.34%	4.0.1	30/12/2020 09:59
2	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	34	2348	2368	14	99.41%	4.0.1	30/12/2020 12:04
3	PENGADILAN AGAMA LAHAT	64	809	868	5	99.45%	4.0.1	30/12/2020 09:58
4	PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU	48	1740	1774	14	99.22%	4.0.1	29/12/2020 23:04
5	PENGADILAN AGAMA MARTAPURA	35	1102	1130	7	99.38%	4.0.1	30/12/2020 08:14
6	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	0	1418	1407	11	99.22%	4.0.1	30/12/2020 11:07
7	PENGADILAN AGAMA MUARADUA	0	360	357	3	99.17%	4.0.1	30/12/2020 11:39
8	PENGADILAN AGAMA PAGARALAM	0	366	361	5	98.63%	4.0.1	30/12/2020 10:50
9	PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	298	2987	3050	235	92.85%	4.0.1	30/12/2020 09:54
10	PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI	18	876	869	25	97.2%	4.0.1	28/12/2020 18:04
11	PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH	18	775	780	13	98.36%	4.0.1	28/12/2020 18:50
12	PENGADILAN AGAMA SEKAYU	12	782	787	7	99.12%	4.0.1	29/12/2020 18:26
Total		530	14283	14462	351	97.63%		

Load Time: 0.0626 Sec Hasil Screen Shoot Halaman Rekapitulasi Data SIPP MA Pada Sinkronisasi Terakhir Version 4.0.1

Bab V

Peningkatan Pelayanan Publik

Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam komitmen melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), pada tahun 2018 Pengadilan Agama Muara Enim telah berhasil meraih predikat **A (Excellence)** yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 14 Juli 2018 di Balikpapan.

Gambar Sertifikat SAPM Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2018



Selanjutnya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga)

tahun dihitung tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 22 Juni 2021, dengan rencana *audit surveillance* pada Juni 2019, Juni 2020, dan Juni 2021.

Pada *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019, Senin 17 Juni 2019. *Lead Assessor*, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., datang dengan didampingi oleh tiga orang asesor pendamping, diantaranya Hj. Fara Umitha, S.H., Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H., dan Arpita Pitriyanti, S.H., untuk melakukan *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019 di Pengadilan Agama Muara Enim.

Pada *audit surveillance* pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2019 itu, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mempertahankan predikat **A (Excellent)**, sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5367/DJA/OT.01.3/ X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Gambar Lampiran Surat Dirjen Badilag Atas Assessment Surveillance APM Tahun 2019

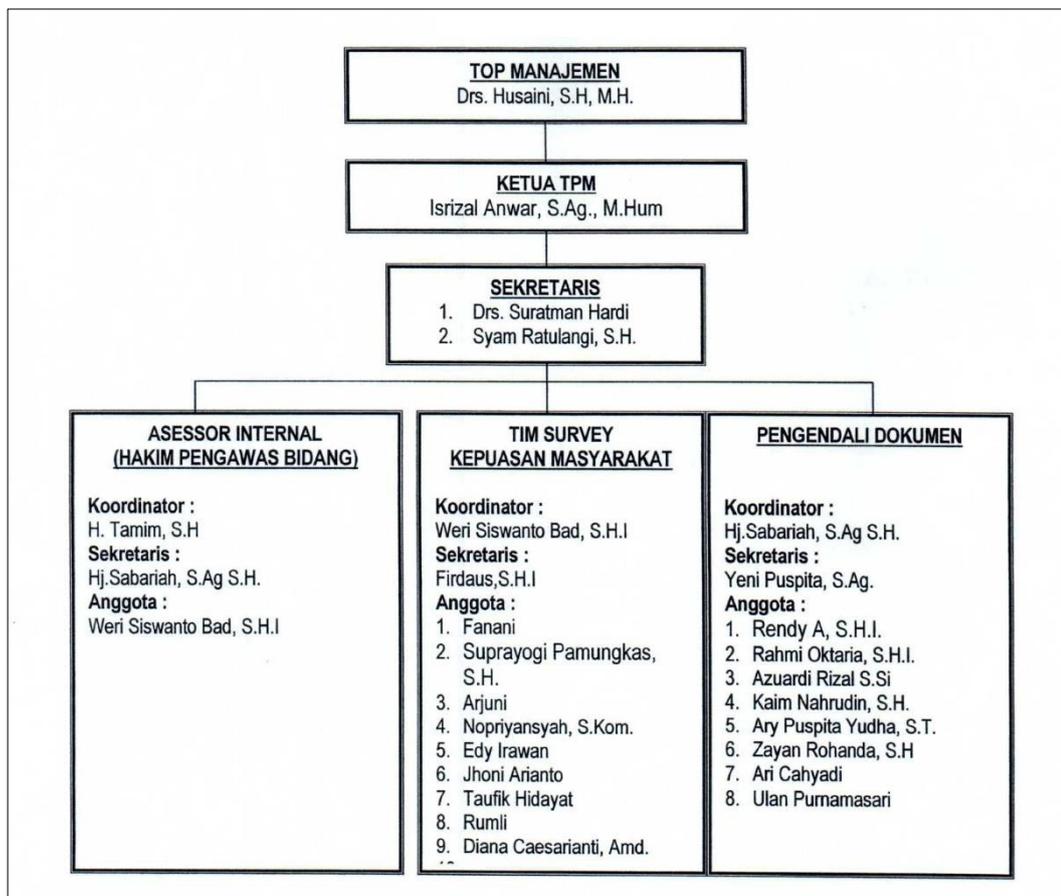
Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 5367 /DJA/OT.01.3/X/2019 Tanggal : 30 Oktober 2019				
HASIL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019				
NO	SATUAN KERJA	KELAS	PREDIKAT	PEROLEHAN
7	PTA Palembang			
1.	PTA Palembang	-	A (Excellent)	Surveillance I 2019
2.	PA Sekayu	II	A (Excellent)	SAPM II 2018
3.	PA Lubuk Linggau	IB	A (Excellent)	SAPM II 2018
4.	PA Kayu Agung	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2018
5.	PA Palembang	IA	A (Excellent)	Surveillance I 2018
6.	PA Muara Enim	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019
7.	PA Baturaja	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019
8.	PA Lahat	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2019

Kemudian dalam menghadapi *audit surveillance* kedua Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, Drs. Husaini, S.H., M.H.. telah membentuk Tim Penjaminan Mutu (TPM), berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/984/OT.01.3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Tabel Susunan Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN	
		DALAM INSTANSI	DALAM TIM AKREDITASI
1.	Drs. Husaini, S.H., M.H.	KETUA	TOP MANAJEMAN
2.	Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.	WAKIL KETUA	KETUA TIM PENJAMINAN MUTU
3.	Drs. Suratman Hardi	PANITERA	SEKRETARIS
4.	Syam Ratulangi, S.H.	SEKRETARIS	
5.	H. Tamim, S.H.	HAKIM	ASESSOR INTERNAL
6.	Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.	HAKIM	
7.	Weri Siswanto Bad, S.H.I.	HAKIM	
8.	Weri Siswanto Bad, S.H.I.	HAKIM	TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
9.	Firdaus, S.H.I.	PANITERA MUDA HUKUM	
10.	Fanani	JURU SITA	
11.	Suprayogi Pamungkas, S.H.	JURU SITA	
12.	Arjuni	HONORER	
13.	Nopriyansyah, S.Kom	HONORER	
14.	Edy Irawan	HONORER	
15.	Jhoni Arianto	HONORER	
16.	Taufik Hidayat	HONORER	
17.	Rumli	HONORER	
18.	Diana Caesarianti, A.Md.	HONORER	
19.	Yeni Puspita, S.Ag.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	PENGENDALI DOKUMEN
20.	Rendy A, S.H.I.	PANMUD GUGATAN	
21.	Rahmi Oktaria, S.H.I.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
22.	Azuardi Rizal, S.S.I.	KASIBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	
23.	Kaim Nahrudin, S.H.	JURU SITA	
24.	Zayan Rohanda, S.H.	SATF KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
25.	Ary Puspita Yudha, S.T.	STAF UMUM DAN KEUANGAN	
26.	Ari Cahyadi	HONORER	
27.	Ulan Purnamasari, S.H.	HONORER	

Bagan Struktur Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020



Pada *audit surveillance* kedua Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020, Rabu 11 November 2020 Tim Asesmen Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Wahyu Setiyawan, S.H. sebagai *Lead Asessor* dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Hj. Farah Umita, S.H. (Pendamping Asessor) dan Arpita Fitriyanti, S.H. (Pendamping Asessor), berdasarkan surat tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 493/DjA.3/ST/11/2020 tanggal 6 November 2020 dan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1681/OT.01.3/XI/2020 tanggal 9 November 2020 telah selesai melaksanakan observasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan bagian dari penilaian *assessment surveillance* kedua.

Berdasarkan hasil rapat komite keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, Pengadilan Agama Muara Enim berhasil mempertahankan predikat **A (Excellent)**, sesuai Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020.

Gambar Lampiran Surat Dirjen Badilag Atas Assessment Surveillance APM Tahun 2020

Lampiran Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama/
Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama MA RI
Nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020
Tanggal: 30 November 2020

**PENETAPAN HASIL ASSESSMENT SURVEILLANCE
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020**

NO.	UNIT KERJA	KELAS	PREDIKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VI	PTA PALEMBANG	-	A (Excellent)	TETAP
1	PA PALEMBANG	IA	A (Excellent)	TETAP
2	PA BATURAJA	IB	A (Excellent)	TETAP
3	PA KAYU AGUNG	IB	A (Excellent)	TETAP
4	PA LAHAT	IB	A (Excellent)	TETAP
5	PA LUBUK LINGGAU	IB	A (Excellent)	TETAP
6	PA MUARA ENIM	IB	A (Excellent)	TETAP
7	PA MARTAPURA (p)	II	A (Excellent)	NAIK
8	PA MUARADUA	II	A (Excellent)	NAIK
9	PA PAGAR ALAM	II	A (Excellent)	TETAP
10	PA PANGKALAN BALAI	II	A (Excellent)	TETAP
11	PA PRABUMULIH	II	A (Excellent)	NAIK
12	PA SEKAYU	II	A (Excellent)	TETAP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penempatan dan Desain PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/ pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim terletak di sisi sudut kanan belakang gedung kantor. Pintu masuknya jadi satu kesatuan dengan pintu masuk ke ruang tunggu sidang. Para pihak berperkara dapat mengikuti petunjuk arah untuk menuju ke ruang tersebut. Ruang PTSP Pengadilan Agama Muara Enim berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 m² x 6 m², dilengkapi tulisan “Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim” di tengah dinding partisi, dan pada setiap lokat layanan dilengkapi papan keterangan jenis layanan yang terletak di bagian atas.

Gambar Desain Ruang PTSP Pengadilan Agama Muara Enim



PTSP dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan; dan menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan.

PTSP di Pengadilan Agama Muara Enim diselenggarakan oleh Tim Pengelola PTSP yang terdiri atas pengarah PTSP yang dijabat oleh Ketua Pengadilan, Penanggungjawab PTSP yang dijabat oleh Panitera dan Sekretaris, Pelaksana PTSP yang dijabat oleh seluruh Panitera Muda dan Kepala Subbagian, dan Petugas PTSP yang dijabat oleh pegawai-pegawai yang dinilai cakap dan mampu.

Fasilitas PTSP

Fasilitas Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Muara antara lain :

Tabel Daftar Fasilitas PTSP

Nama Fasilitas PTSP	Jumlah	Kondisi	Keterangan
Meja Panjang Terintegrasi	1	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Kursi Petugas	6	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Kursi Hadap	6	Baik	Sesuai jumlah pengguna layanan PTSP
Kursi Tunggu	4	Baik	Untuk pengguna layanan PTSP menunggu antrian
Komputer	6	Baik	Sesuai jumlah petugas PTSP
Printer	2	Baik	Terdapat pada Petugas Kasir dan Produk Pengadilan
Brosur Daftar Panjar Biaya	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Brosur Syarat-Syarat Perkara	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Brosur Permohonan Informasi dan Pengaduan	1	Baik	Tersedia brosur yang dicetak warna serta dapat diambil oleh pengguna layanan PTSP
Telepon	1	Baik	Telepon saluran internal dan eksternal (PABX) yang difungsikan
Alat Tulis	6	Baik	Alat tulis yang tersedia sesuai jumlah petugas PTSP dan dipergunakan
Buku Register/Jurnal	3	Baik	Tersedia Register dan Jurnal yang digunakan
Kotak Saran	1	Baik	Kotak saran sebagai survei layanan harian
Papan Nama Petugas	6	Baik	Tersedia papan nama petugas PTSP yang disertai foto dan identitas
Papan Jam Layanan	1	Baik	Tersedia papan jam layanan petugas PTSP
Papan Jam Istirahat	1	Baik	Tersedia papan jam istirahat petugas PTSP

Sarana Penunjang PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sudah didukung oleh sarana penunjang yang cukup memadai, diantaranya mesin antrian pengunjung, tv media center dan cctv. Untuk mengoptimalkan kinerja PTSP, Pengadilan Agama Muara Enim memanfaatkan aplikasi-aplikasi di bidang administrasi perkara (SIPP, E-Court, Gugatan Mandiri) dan administrasi umum yang disediakan Mahkamah Agung dan/atau dikembangkan oleh Pengadilan.

Layanan Pokok PTSP

Terdapat 6 (enam) jenis layanan pokok pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim, yakni layanan permohonan informasi, layanan pendaftaran perkara, layanan e-court, layanan pembayaran biaya (kasir), layanan penyerahan produk pengadilan, dan layanan pengajuan keluhan/ pengaduan, dimana setiap loket layanan tersebut akan melayani sesuai jenis layanan masing-masing.

Layanan permohonan informasi meliputi :

1. Permohonan informasi biasa.
2. Permohonan informasi khusus.

Layanan e-court meliputi :

1. Pembuatan akun pengguna non advokat (perorangan, pemerintah, badan hukum, kuasa insidentil).
2. Aktivasi akun pengguna non advokat (perorangan, pemerintah, badan hukum, kuasa insidentil).
3. Validasi pendaftaran perkara e-court (gugatan online, gugatan sederhana online, permohonan online).
4. Pembuatan virtual account (e-payment).
5. Panggilan elektronik (e-summons).

Layanan pendaftaran perkara meliputi :

1. Pendaftaran perkara gugatan/ permohonan tingkat pertama.
2. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
3. Pendaftaran pemeriksaan setempat (Descente).
4. Pendaftaran permohonan konsinyasi.
5. Pendaftaran sita jaminan.
6. Pendaftaran permohonan eksekusi.
7. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Layanan layanan pembayaran biaya meliputi :

1. penaksiran panjar biaya perkara.
2. pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar.
3. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. pengembalian sisa panjar biaya perkara.
5. penyerahan bukti-bukti pembayaran.
6. layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi :

1. salinan putusan/ penetapan.
2. akta cerai.
3. dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi :

1. pelanggaran KEPPH.
2. penyalahgunaan wewenang/jabatan.
3. pelanggaran sumpah jabatan.
4. pelanggaran peraturan disiplin pegawai.
5. perbuatan tercela.
6. pelanggaran hukum acara.
7. mal administrasi.
8. pelayanan publik.

Layanan Pendukung PTSP

Terdapat 3 (Tiga) jenis layanan pendukung pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Muara Enim, yakni pemberian bantuan hukum (Posbakum), penyetoran panjar biaya perkara (Bank), dan pembelian meterai dan legalisir (Pos).

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk jasa layanan pos bantuan hukum, sehingga Pengadilan Agama Muara Enim melakukan kerjasama dengan Posbakum yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sedangkan layanan penyetoran panjar biaya perkara dilakukan dengan cara di ambil oleh petugas Bank BNI Syariah pada setiap pukul 15.00 WIB untuk selanjutnya di setor ke rekening perkara Pengadilan Agama Muara Enim. Kemudian untuk pembelian meterai dan legalisir dilakukan dengan cara mendatangkan petugas pos pada pukul 15.00 WIB untuk melakukan penempelan materai dan legalisir dokumen alat bukti.

Prosedur Layanan PTSP

Waktu operasional layanan PTSP sesuai dengan jam operasional kantor dan seluruh layanan dalam PTSP diberikan sesuai dengan prosedur baku . (*Standard Operating Procedure*) setiap jenis layanan pada PTSP.

<p>"SENIN - KAMIS" Waktu Layanan : 08:00 WIB - 16:30 WIB Waktu Istirahat : 12:00 WIB - 13:00 WIB</p>	<p>"JUM'AT" Waktu Layanan : 08:00 WIB - 17:00 WIB Waktu Istirahat : 11:30 WIB - 13:00 WIB</p>	<p>"SABTU DAN MINGGU" Tidak Ada Pelayanan "TANGGAL MERAH" Tidak Ada Pelayanan</p>
--	---	---

Performa Petugas PTSP

Petugas PTSP Pengadilan Agama Muara Enim sedemian rupa dapat memahami kedudukan, struktur organisasi dan kompetensi Pengadilan, memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas PTSP, terampil

mengoperasikan komputer, memahami prinsip-prinsip pelayanan Pengadilan yang prima, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan bekerja sama dalam Tim. Dalam meningkatkan kompetensi Petugas PTSP, Ketua Pengadilan telah mengupayakan Petugas PTSP untuk mengikuti pelatihan pelayanan Pengadilan yang dilakukan oleh trainer dari BRI.

Gambar Petugas PTSP Mengikuti Bimbingan Pemberian Layanan



Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Agama Muara Enim telah melaporkan beberapa inovasi pelayanan publik kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, melalui Surat Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/130/KP.02.1/I/2020 tanggal 6 Januari 2021, tentang Penilaian Kinerja Satuan Kerja Triwulan IV Tahun 2020 di Lingkungan Peradilan Agama. Adapun inovasi pelayanan publik tersebut diantaranya adalah Antrian PTSP.

Antrian PTSP merupakan aplikasi antrian bagi pengunjung yang hendak berurusan di ruang pelayanan terpadu satu pintu. Aplikasi ini berbasis web yang dijalankan pada sebuah server lokal dalam satu jaringan *local area network* (LAN). Dalam mengimplementasikan inovasi ini, dibutuhkan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*brainware*).

Kebutuhan perangkat keras untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan publik berupa aplikasi antrian PTSP ini terdiri dari beberapa perangkat, yaitu :

Tabel Kebutuhan Perangkat Keras untuk Aplikasi Antrian PTSP

Nama Perangkat	Jumlah	Spesifikasi Minimum	Uraian Keperluan
Kios Touch Screen	1 Unit	OS Android, Layar Sentuh, LAN/Wifi, Speaker	Digunakan untuk mengambil nomor antrian pengunjung
All In One PC Desktop	4 Unit	OS Windows 10 64 Bit, DDR4 4GB, 500GB Hardisk, LAN/Wifi	Digunakan untuk petugas meja loket : 1. Informasi 2. Pendaftaran 3. Kasir 4. Produk Pengadilan
TV Led	1 Unit	Layar 32 Inchi, HDMI, Speaker	Digunakan untuk menampilkan nomor antrian yang sedang di panggil ke meja loket, dan sekaligus mengeluarkan suara pemanggilan nomor antrian
Printer Thermal	1 Unit	Support Windows, USB Port, Ukuran Kerta 58 mm	Digunakan untuk mencetak nomor antrian yang diambil oleh pengunjung

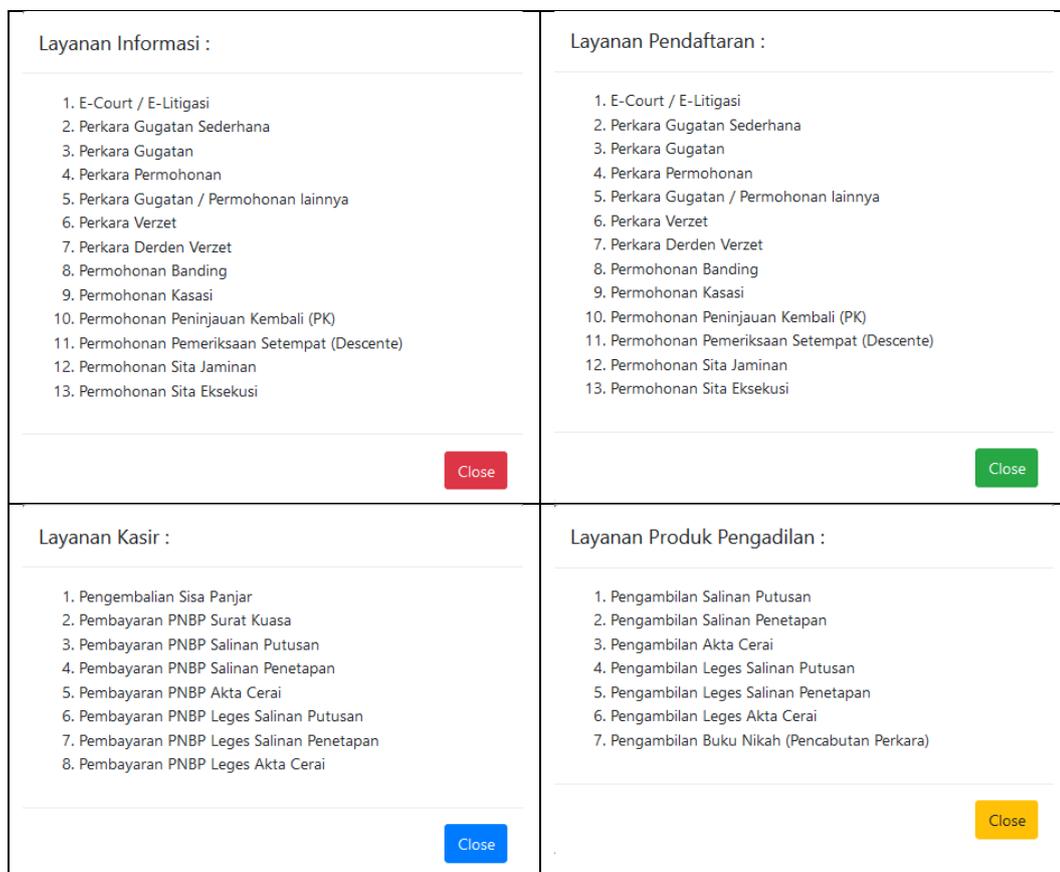
Gambar Tampilan Utama Aplikasi Antrian PTSP



Gambar Tampilan Loket Ambil Antrian Aplikasi Antrian PTSP



Gambar Tampilan Jenis Layanan yang Disediakan Aplikasi Antrian PTSP



Gambar Tampilan Layar Panggil Aplikasi Antrian PTSP

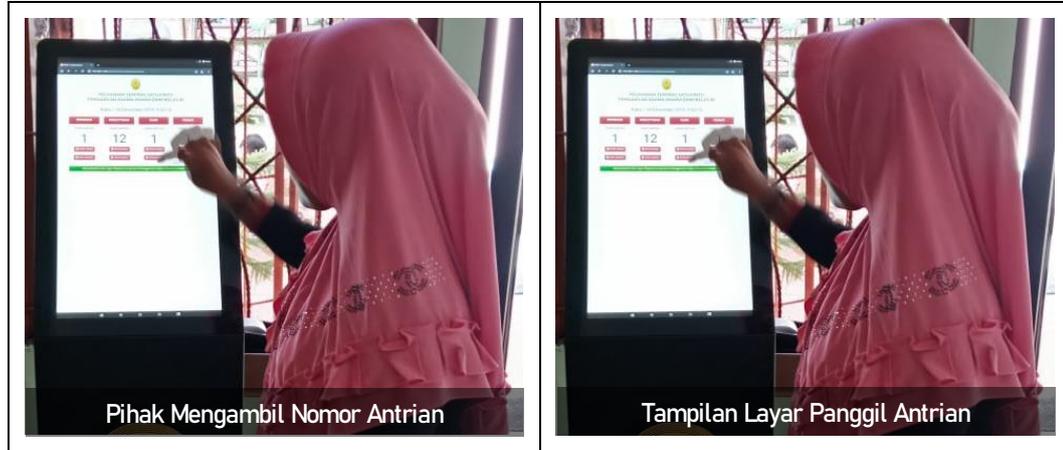


Gambar Tampilan Meja Loker Aplikasi Antrian PTSP



Inovasi pelayanan publik antrian PTSP ini dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Penyelesaian pekerjaan pembuatan aplikasi ini yaitu pada tanggal 3 September 2019 dan telah diimplementasikan secara utuh pada awal Januari 2020, kemudian sampai sekarang aplikasi antrian PTSP ini masih berjalan dengan baik dan dapat digunakan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Muara Enim. Aplikasi ini dinilai sangat bermanfaat dalam menertibkan pelayanan informasi, pendaftaran, kasir, dan produk pengadilan di ruang PTSP.

Gambar Para Pihak Mengambil Antrian Layanan PTSP



Selain dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan sendiri, Pengadilan Agama Muara Enim juga mengimplementasikan 11 (sebelas) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok, sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1517/DjA/HM.00/4/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Himbauan Memasang Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/884/HK.05/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020 tentang laporan pelaksanaan 11 aplikasi unggulan Ditjen Badilag.

Sebelas Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama tersebut telah di instal dan diuji coba dan berjalan dengan baik. Berikut ini gambaran hasil implementasi pelaksanaannya :

11 (sebelas) Aplikasi Inovasi Dirjen Badilag



1. Aplikasi Notifikasi Perkara

Pengadilan adalah lembaga yang terbuka untuk semua kalangan, namun seringkali masyarakat yang datang ke pengadilan adalah masyarakat awam yang baru pertama kali datang ke pengadilan, jangankan mengerti persoalan hukum, persoalan administrasi di pengadilan pun terkadang membuat bingung. Bagaimana proses yang harus dijalani, apa yang harus disiapkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara.

Proses berperkara di persidangan memang harus melewati tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, dari tahapan administrasi sampai tahapan

persidangan. Para pihak sering kali bingung atau mungkin tidak tahu apa yang mesti dilakukan setelah melewati satu proses, sehingga dibutuhkan satu cara atau terobosan untuk bisa mengingatkan para pihak bahwa proses perkara yang dijalaninya sudah sampai tahapan apa. Hal ini akan memudahkan pihak yang berperkara untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang sama sekali baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama tingkat pertama belum pernah dilakukan. Inilah yang mendorong Ditjen Badilag untuk mengembangkan sistem aplikasi ini.

Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal dalam suatu perkara maupun Kuasa Hukumnya.

Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersumber dari data kependudukan dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara.

Gambar Tampilan Balasan Notifikasi SMS



Gambar Banner / Brosur SMS Notifikasi Perkara



Fungsi Aplikasi :

1. Memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara.
2. Bersifat aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).

2. Aplikasi Informasi Produk dan Perkara

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, mungkin fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih aktif dan personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar.

Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan.

Gambar Tampilan Aplikasi Informasi dan Produk Perkara

The screenshot displays the 'A.C.O. Integrated System' interface. It features a sidebar with navigation icons and a main content area. The main content is divided into two sections: 'Data Umum' (General Data) and 'Keuangan Perkara' (Case Finance).

Data Umum

Nomor Perkara	1059/Pdt.G/2019/PA/ME
Jenis Perkara	Cerai Gugat
Tanggal Pendaftaran	20 November 2019
Penggugat	Henti Pusta Sari binti Harmudin Jalan Pertamina, Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Tergugat	Firmanayah bin H.Amin Dusun I, Desa Parun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Keuangan Perkara

Tanggal	Uraian	Kredit	Debet	Saldo
20 November 2019	Panjar Biaya Perkara	1171000	0	1171000
20 November 2019	Biaya Pendaftaran/PNBP	0	30000	1141000
20 November 2019	Biaya Pemberkasari/ATK	0	50000	1091000
Jumlah		1171000	80000	1091000

Fungsi Aplikasi : Memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

3. Aplikasi Antrian Sidang

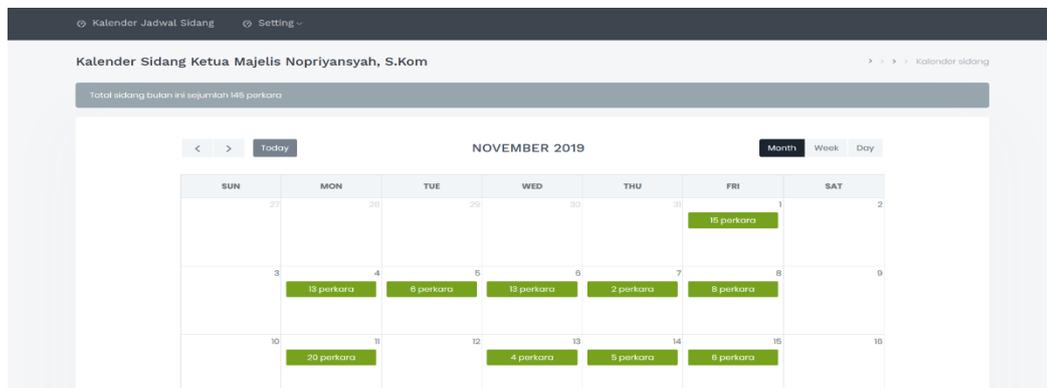
Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan yang menangani perkara dengan volume yang sangat tinggi/overload, mengingat banyaknya jumlah perkara yang disidangkan setiap harinya, khususnya di pulau jawa.

Selain itu, terbatasnya jumlah hakim dan jumlah ruang sidang mengakibatkan persidangan harus dilakukan secara bergantian, yang pada akhirnya mengakibatkan masa tunggu untuk mengikuti sidang menjadi cukup lama.

Sudah lazim diketahui, sebaran jumlah perkara di berbagai wilayah sangatlah variatif, ini sangat tergantung kepada padatnya jumlah penduduk dan jumlah penduduk muslim yang ada di suatu daerah.

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan pembagian jadwal persidangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengatur waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan.

Gambar Tampilan Aplikasi Antrian Sidang online



Fungsi Aplikasi :

1. Menyediakan pendaftaran antrean secara online.
2. Memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sesuai dengan kebutuhannya.

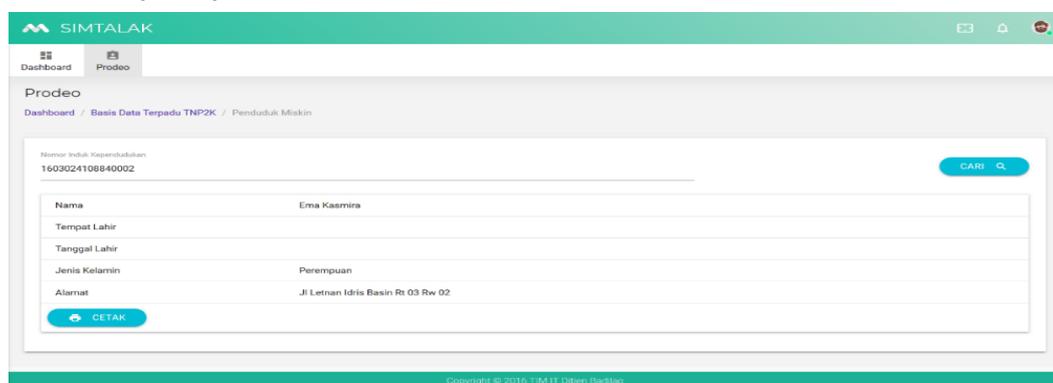
4. Aplikasi Data Kemiskinan

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan mengatur tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Pembebasan Biaya Perkara; Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan. Pembebasan biaya perkara artinya para pencari keadilan yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara.

Kemudahan yang diberikan Perma 1/2014 ternyata menyisakan sedikit persoalan dalam pelaksanaannya. Pembebasan biaya perkara yang sudah dianggarkan pada suatu pengadilan tidak terserap dengan baik, disebabkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau surat sejenisnya yang diperlukan, bahkan untuk pembuatan surat tersebut seringkali membutuhkan lebih banyak waktu dan juga biaya.

Ditjen Badilag telah membuat aplikasi verifikasi data kemiskinan, aplikasi ini nantinya dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan, pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya.

Gambar Tampilan Aplikasi Data Kemiskinan



The screenshot shows the SIMTALAK application interface. At the top, there is a green header with the SIMTALAK logo and navigation icons. Below the header, there are tabs for 'Dashboard' and 'Prodeo'. The main content area is titled 'Prodeo' and contains a search bar with the text 'Nomor Induk Kependudukan' and the value '1603024108840002'. A search button labeled 'CARI' is next to the search bar. Below the search bar, there is a form with the following fields: 'Nama' (Erna Kasmina), 'Tempat Lahir', 'Tanggal Lahir', 'Jenis Kelamin' (Perempuan), and 'Alamat' (Jl Letnan Idris Basir Rt 03 Rw 02). A 'CETAK' button is located at the bottom left of the form. The footer of the application shows 'Copyright © 2016 TIM IT: Dilijan Badilag'.

Gambar Tampilan Hasil Cetak Aplikasi Data Kemiskinan

DATA PENDUDUK MISKIN BASIS DATA TERPADU TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)	
NIK	1603024108840002
Nama	Ema Kasmira
Tempat / Tanggal Lahir	/
Jenis Kelamin	Perempuan
Alamat	Jl Letnan Idris Basin Rt 03 Rw 02
Nomor Kartu Program Keluarga Harapan	
Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	
Nomor Kartu Penerima Bantuan Iuran BPJS	

Data tersebut di atas dicetak melalui Aplikasi Basis Data Terpadu Daftar Penduduk Miskin pada Ditjen Badan Peradilan Agama di laman <https://simtalak.badilag.net> bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk kepentingan beracara secara prodeo pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Dicetak di _____
Pada tanggal 16 Oktober 2019
Petugas Cetak

(_____)
NIP. _____

5. Aplikasi Command Center

Untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama baik tingkat pertama maupun banding, Ditjen Badilag selalu membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Banyaknya jumlah satuan kerja dan jumlah pegawai di lingkungan peradilan agama menyebabkan kebutuhan tenaga dan biaya pembinaan menjadi besar, hal ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan dan monitoring terhadap seluruh hakim dan aparat peradilan jika hal ini dilakukan dengan cara konvensional.

Perlu dicari cara agar koordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik, berbiaya murah, cakupan wilayah dan peserta yang lebih banyak, dan hasil yang lebih maksimal.

Command Center bukan merupakan hal yang baru, bahkan di beberapa negara maju penggunaannya adalah hal yang lazim. Namun pemanfaatannya untuk lembaga peradilan masih belum masif digunakan. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan hal ini sebagai suatu terobosan yang patut untuk diaplikasikan secepatnya.

Ditjen Badilag sedang mengembangkan Command Center Badilag yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.

Gambar Tampilan Aplikasi Command Center



Fungsi Aplikasi

1. Pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus.
2. Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time.
3. Pusat pengembangan E Learning.
4. Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama.
5. Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

6. Aplikasi PNBP Fungsional

Ada persoalan yang beberapa tahun belakangan belum bisa ditemukan solusinya. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBPFungsional Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius.

Ditjen Badilag mengembangkan aplikasi yang diharapkan bisa mengatasi persoalan ini, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBPFungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, Penyetoran PNBPFungsional tepat waktu dan lengkap, yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetor PNBPFungsional pada tahun berjalan.

Gambar Tampilan Aplikasi PNBP Fungsional

The screenshot shows the 'BUKU PENERIMAAN HAK HAK KEPANITERAAN (PNBP)' interface. It includes a date filter set to '16/10/2019' and a 'Cetak' button. The table below represents the data shown in the application.

Tanggal	Urutan	No Bukti	Biaya Pendaftaran				Biaya Redaksi	Jumlah	Keterangan
			Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Peninjauan Kembali			
			C2	C1	A1	A2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 Oktober 2019	467/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	10.000,00,-	
16 Oktober 2019	674/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	20.000,00,-	
16 Oktober 2019	875/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	30.000,00,-	
16 Oktober 2019	881/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	40.000,00,-	
16 Oktober 2019	883/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	50.000,00,-	
16 Oktober 2019	885/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	60.000,00,-	
16 Oktober 2019	886/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	70.000,00,-	
16 Oktober 2019	888/Pdt.G/2019/PA.ME		-	-	-	-	10.000,00,-	80.000,00,-	

Fungsi Aplikasi

1. Pencatatan PNBP Fungsional secara lengkap, mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara.
2. Sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP Fungsional ke Kas Negara pada tahun berjalan.
3. Pengukuran kinerja kasir dan bendahara penerimaan.

7. Aplikasi E-Eksaminasi

Saat ini belum ada mekanisme untuk mengetahui kualitas putusan hakim, biasanya untuk mengetahui kualitas putusan hakim dalam jumlah banyak hanya bisa dilakukan dengan cara penelitian yang membutuhkan waktu lama, biaya yang banyak, dan hasilnya pun masih sangat terbatas. Dengan kuantitas satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia yang cukup besar (412 pengadilan tingkat pertama, 29 Satker tingkat banding) dengan banyaknya jumlah hakim menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Badilag untuk memetakan kualitas putusan dan berkas perkara serta kemampuan teknis administrasi yustisial hakim peradilan agama di Indonesia.

Selama ini, terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan

kualitas putusan hakim, karena ketidakterediaan data kualitatif yang seharusnya dapat dikuantitatifkan tersebut. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Ditjen Badilag akan melakukan eksaminasi silang terhadap putusan hakim tingkat pertama, dimana putusan hakim tingkat pertama akan dieksaminasi oleh 3 (tiga) hakim tinggi yang bertugas di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda.

Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama melalui Direktori Putusan, kemudian setiap putusan akan dicek kelengkapan data perkaranya melalui aplikasi SIPP, kemudian dieksaminasi oleh tiga orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim, artinya hakim tingkat pertama yang dieksaminasi tidak mengetahui siapa yang melakukan eksaminasi, hal ini untuk menjaga objektivitas proses eksaminasi.

Aplikasi ini adalah sebuah sistem evaluasi dan penilaian secara elektronik terhadap penerapan hukum formil dan materiil oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan kebijakan, diklat, serta promosi dan mutasi.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Eksaminasi

NO	PESERTA		EKSAMINATOR		STATUS	NOMOR PERKARA	NILAI	DETAIL
	MULAI	SELESAI	MULAI	SELESAI				
1	24 Januari 2020	11 Februari 2020	12 Februari 2020	6 Maret 2020	Selesai	1120/Pdt.G /2019/PA.ME	1855	

Fungsi Aplikasi

1. Untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara.
2. Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara.
3. Mendorong Hakim untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan profesionalisme dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
4. Mendapatkan bahan pemetaan kompetensi dan pemerataan komposisi Hakim di peradilan agama.
5. Mendapatkan bahan pembinaan yang lebih tepat sasaran guna penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Hakim dalam bentuk bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan.

8. E-Register

Bahwa yang dimaksud dengan e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketua Pengadilan bertanggung jawab penuh dalam melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari kerja, paling lambat satu jam sebelum jam kerja berakhir guna memastikan seluruh data perkara dan data keuangan perkara pada hari tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIPP secara tepat dan benar.

Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama membangun aplikasi e-Register yang dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

Aplikasi e-Register mempunyai beberapa menu utama, yaitu menu Validasi, Cetak dan Register Non SIPP.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Register

Perbandingan Validasi Data Harian dan Data SIPP Tanggal 23 Juni 2020									
Data Validasi Harian			Data SIPP						
No	Nama Proses	Jml Pemanding	Jml	No	Nama Proses	Jml Pemanding	Jml		
1	Pendaftaran Perkara	3	Panjar Biaya Perkara	3	1	Pendaftaran Perkara	3	Panjar Biaya Perkara	3
2	Persidangan	15	Proses Jadwal Sidang	15	2	Persidangan	15	Proses Jadwal Sidang	15
3	Jadwal Mediasi	1	Proses Jadwal Mediasi	1	3	Jadwal Mediasi	1	Proses Jadwal Mediasi	1
4	Keputusan Mediasi	0			4	Keputusan Mediasi	0		

REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM BULAN JUNI 2020

1.	Nomor Urut	1
2.	Nomor Perkara	338/Pdt.G/2020/PA.ME
3.	Tanggal Pendaftaran	02 Juni 2020
4.	Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum	
	A.	<p>Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal</p> <p>Yolanda Putri binti Heru Santana, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan SDN.1, Kebun Sayur, RT.01, RW. II, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir(PALI),, sebagai Penggugat;</p> <p style="text-align: center;">melawan</p> <p>Kindri Rahmansyah bin Saiman, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Batu Raja, Dusun I, RT.02, RW. 01, Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sebagai Tergugat;</p>

efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Aplikasi ini digunakan untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara meliputi:

- a. Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA1/G)
- b. Buku jurnal perkara permohonan (KI-PA1/P)
- c. Buku jurnal permohonan banding (KI-PA2)
- d. Buku jurnal permohonan kasasi (KI-PA3)
- e. Buku jurnal permohonan peninjauan kembali (KI-PA4)
- f. Buku jurnal permohonan eksekusi (KI-PA5)
- g. Buku induk keuangan perkara (KI-PA6)
- h. Buku keuangan biaya eksekusi (KI-PA7)
- i. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KI-PA8a)
- j. Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan lainnya (KI-PA8b)

Hasil cetak buku induk keuangan perkara pada aplikasi ini, dibagi menjadi tiga versi, meliputi:

- a. Versi bindalmin, yaitu hasil cetaknya sama persis Buku Induk Keuangan Perkara pada umumnya.
- b. Versi ringkas, di mana kolom-kolom dalam Buku Induk Keuangan Perkara lebih ringkas menyesuaikan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara.
- c. Versi rekap, yaitu hasilnya dikelompokkan berdasarkan nomor perkara. Penerapan aplikasi keuangan perkara di lingkungan peradilan agama diatur dalam Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019, hal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama dan Surat Dirjen Badilag Nomor 0956/DJA/HM.02.3/III/2019, tanggal 18 Maret 2019 hal Penggunaan Aplikasi Pendukung SIPP untuk memonitor dan mencetak laporan keuangan perkara.

Gambar Tampilan Aplikasi E-Keuangan



Fungsi Aplikasi

1. Sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara.
2. Sebagai sarana pencetakan buku-buku keuangan perkara.
3. Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara.

10. Validasi Akta Cerai

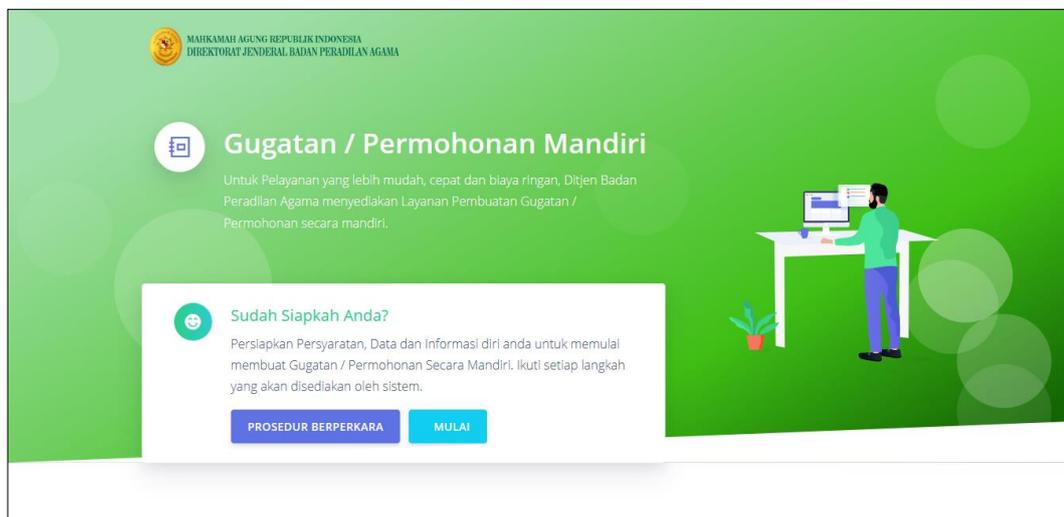


Fungsi Aplikasi

Sebagai sarana verifikasi dan validasi Akta Cerai dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta cerai.

11. Gugatan Mandiri

Memfasilitasi para pihak sebagai pengguna layanan peradilan dalam membuat gugatan/permohonan mandiri secara online.



Bab VI

Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar setiap tugas yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari sekian bentuk pengawasan, maka pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri.

Landasan hukum pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 001/SK/11/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/006/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006, tanggal 19 Oktober 2006, tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007, tentang Pemberlakuan Buku I.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

Dalam membantu pimpinan melakukan pengawasan bidang pada kepaniteraan dan kesekretariatan tahun 2020, Ketua Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan dan menunjuk Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor W6-A5/1460/PS.00/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020. Koordinator Pengawas Bidang sebelumnya adalah Drs. Husaini, S.H., M.H., kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 Koordinator Pengawas Bidang digantikan oleh Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum., yang promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB berdasarkan hasil rapat pimpinan tanggal 15 Juli 2020, menggantikan Drs. Husaini, S.H., M.H., yang promosi menjadi Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB berdasarkan hasil rapat pimpinan

tanggal 15 Juli 2020. Dengan demikian adapun susunan hakim pengawas bidang pada Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Susunan Hakim Pengawas Bidang

Nama	Jabatan	Bidang Pengawasan
Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. NIP. 197301061999031006	Wakil Ketua Hakim Madya Muda	Koordinator Pengawasan
H. Tamim, S.H. NIP. 196407291988021001	Hakim Madya Utama	Manajemen Peradilan : 1. Program Kerja 2. Pelaksanaan/pencapaian target 3. Pengawasan dan pembinaan 4. Kendala dan hambatan 5. Faktor-faktor yang mendukung 6. Evaluasi kegiatan Administrasi Umum : 7. Kepegawaian 8. Keuangan DIPA 9. Inventaris BMN 10. Perpustakaan 11. Tertib persuratan dan perkantoran
Hj. Sabariah, S.Ag., S.H. NIP. 196903061997032004	Hakim Madya Muda	Administrasi Perkara : 1. Prosedur penerimaan perkara 2. Prosedur penerimaan permohonan banding 3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi 4. Prosedur penerimaan permohonan PK 5. Ketepatan pengiriman berkas banding, kasasi, PK 6. Keuangan perkara dan biaya proses serta konsinyasi 7. Pemberkasian perkara dan kearsipan 8. Pelaporan perkara dan keuangan perkara serta pengelolaan PNB
Yeni Kurniati, S.H.I. NIP. 198303252006042003	Hakim Pratama Utama	Administrasi Persidangan, penyitaan dan pelaksanaan putusan : 1. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim 2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara 3. Minutasi perkara 4. Pelaksanaan putusan (eksekusi), sita dan pelelangan
Weri Siswanto BAD, S.H.I. NIP. 198204252009121003	Hakim Pratama Madya	Pengelolaan IT dan SIPP : 1. Aplikasi SIPP dan SIADPA 2. Aplikasi website kantor 3. Aplikasi Siwas Kinerja pelayanan publik : 1. Pengelolaan manajemen 2. Mekanisme pengawasan 3. Kepemimpinan 4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 5. Pemeliharaan/perawatan inventaris 6. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan 7. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara 8. Proses pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya

A. Internal

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Muara Enim dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan langsung ke objek dan telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Pengawasan internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun repressif, agar pelaksanaan tugas bawahan itu berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan secara rutin setiap bulan dan secara berkala, di samping itu juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat rutin / berkala, rapat pimpinan dan musyawarah setiap permasalahan yang timbul serta mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok peradilan.

Hakim Pengawasan Bidang (Hawasbid)

Hakim Pengawasan Bidang melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala 1 x 1 bulan atau 12 kali dalam satu tahun sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, dan setelah melakukan pengawasan setiap hakim pengawas bidang menyampaikan laporannya secara berkala 1 x 3 bulan kepada Ketua melalui Wakil Ketua (Koordinator Pengawasan) untuk ditindak lanjuti. Ketua Pengadilan membuat laporan tidak lanjut atas penemuan penemuan dari hakim pengawas bidang tersebut setelah hal tersebut di tindaklanjuti.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi bidang :

1. Bidang Manajemen Peradilan
 - Pembinaan sumber daya manusia.
 - Tertib perkantoran dan rumah tangga.
 - Program kerja dan *job descriptions* pegawai.
 - Ketertiban tata kelola persuratan dan pengarsipannya.
 - Penatausahaan dan pengelolaan perpustakaan.

2. Bidang Kinerja Pelayanan Publik

- Penataan meja informasi dan petugas-petugasnya.
- Kecepatan dan ketepatan pelayanan baik dalam permintaan informasi perkara, program kerja, fatwa, dan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pengadilan.
- Penanganan dan tindak lanjut pelaporan dari masyarakat.
- Ketertiban pembukuan keuangan perkara dalam register Induk Keuangan Perkara, buku jurnal, dan buku bendahara.
- Laporan keuangan perkara setiap bulannya dan laporan penerimaan serta pengeluaran PNBPN.
- Ketertiban pembukuan biaya proses.
- Realisasi keuangan biaya prodeo dan posbakum.

3. Bidang Administrasi Persidangan

- Prosedur pendaftaran perkara gugatan, permohonan, *verzet*, *derden verzet*.
- Prosedur pendaftaran *Isbat Rukyah Hilal*.
- Prosedur pemanggilan dan pemberitahuan.
- Pembuatan Berita Acara Sidang.
- Proses pemeriksaan dan putusan.
- Tertib persidangan.
- Prosedur pendaftaran banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- Ketepatan pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- Proses pelaksanaan eksekusi, sita, dan pelelangan umum.

4. Bidang Administrasi Perkara

- Ketepatan waktu minutasi.
- Ketepatan waktu pelapor perkara.
- Ketertiban pembuatan laporan perkara sesuai pola BINDALMIN.
- Ketertiban penyimpanan arsip pada para perkara.

- Ketertiban penyimpanan berkas minutasi dan arsip pelaporan perkara.
- Ketertiban penata usaha arsip perkara.
- Penulisan data perkara ke dalam buku register perkara.
- Penulisan data mediasi ke dalam buku register mediasi.
- Ketertiban penyimpanan dokumen register perkara.
- Ketertiban penulisan ke dalam semua buku register perkara.

5. Bidang Pengelolaan IT dan SIPP

- *Up date* data/informasi kedalam website.
- Backup database perkara pada SIPP.
- Backup database lain aplikasi pendukung SIPP
- Maintenance jaringan internet dan LAN;
- Maintenance SIPP
- Maintenance Website
- Maintenance Antrian PTSP
- Maintenance perangkat teleconference, kios *touch screen*, TV media, CCTV dan server.

6. Bidang Umum

- Tingkat kesejahteraan pegawai seperti kenaikan pangkat, KGB, dan hak-hak pegawai lainnya.
- Tingkatkan kedisiplinan pegawai / absensi.
- Penghargaan dan hukuman pegawai.
- Ketertiban dalam administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan pemeliharannya.
- Kebersihan dan keasrian kantor dan lingkungannya.
- Ketertiban pengelolaan parkir.
- Ketertiban pembukuan keuangan DIPA.
- Realisasi keuangan DIPA.
- Laporan keuangan DIPA.
- Laporan Pajak tahunan untuk semua pegawai.

Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Palembang

Selama tahun 2020, Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah turun sebanyak dua melakukan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Muara Enim.

Pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Palembang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2020 sekaligus audit kinerja Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H., yang mutasi menjadi Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat Kelas IB. Tim Pembinaan dan Pengawasan di ketuai oleh Wakil Ketua PTA Palembang, Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I., dan didampingi oleh Hakim Tinggi PTA Palembang Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H., Kabag Umum dan Keuangan PTA Palembang, Imron Rusadi, S.H. dan Panitera Pengganti PTA Palembang, Sopendi, S.H.

Pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Palembang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2020. sekaligus audit kinerja Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., yang promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA. Tim Pembinaan dan Pengawasan di ketuai oleh Hakim Tinggi PTA Palembang Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H., dengan didampingi oleh Panitera Pengganti PTA Palembang, Sopendi, S.H., dan Staf Kepegawaian dan TI PTA Palembang, M. Abdul Aziz, S.H., M.H.

B. Evaluasi

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Enim telah melaksanakan pengawasan regular terhadap pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Enim, dan evaluasi hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Muara Enim baik dibidang kesekretariatan maupun dibidang kepaniteraan, yaitu :

1. Evaluasi dibidang kepaniteraan khususnya pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi perkara guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna jasa layanan peradilan.
2. Evaluasi dibidang kesekretariatan khususnya pengawasan dan pembinaan pada bagian umum dan keuangan, kepegawaian organisasi dan tata laksanakan, dan perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.
3. Mengacu pada Buku IV Mahkamah Agung tentang tata laksana pengawasan peradilan yang meliputi pengawasan dan pembinaan secara rutin dan reguler, pemeriksaan keuangan dan penanganan pengaduan.

Semua hasil dari pengawasan yang dilakukan baik oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Muara Enim maupun Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditindak lanjuti secara keseluruhan disegala bidang objek pemeriksaan oleh unsur pimpinan Pengadilan Agama Muara Enim.

Bab VII

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara yang ditangani tahun 2020 mencapai 99,22% yakni putus sebanyak 1.407 perkara, dimana jumlah perkara yang ditangani tersebut merupakan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 0 perkara dan perkara diterima tahun 2020 sebanyak 1.418 perkara. Dari jumlah tersebut sisa perkara Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 11 perkara dengan persentase sebesar 0,78%.
2. Pelaksanaan mediasi belum begitu optimal di Pengadilan Agama Muara Enim, sehingga dari 113 perkara yang dimediasi hanya sebanyak 5 perkara yang berhasil mediasi dengan perdamaian, sedangkan sisanya sebanyak 108 perkara tidak berhasil.
3. Anggaran DIPA (01) sebesar Rp 4.453.776.000 (empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 4.078.618.972 (empat milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), jumlah tersebut mencapai **91,58%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 375.157.028 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah), yakni 9,42%.
4. Anggaran DIPA (04) sebesar Rp 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 49.750.000 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut mencapai **100%** dengan sisa anggaran sebesar Rp 0 (nol rupiah), yakni 0%.
5. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat Eselon IV belum terlaksana secara merata dimana pada tahun 2020 masih ada dua

Kepala Sub Bagian masih belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.

6. Diklat Tenaga Teknis Peradilan tidak merata pada tahun 2020, padahal hal ini sangatlah dibutuhkan sekali oleh SDM Tenaga Teknis untuk meningkatkan kompetensinya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis yustisial.
7. Sarana dan prasarana fasilitas perkantoran belum begitu memadai, seperti AC, Printer, TV Media dan Meubelair, dimana kondisinya sebagian besar sudah rusak ringan sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

B. Rekomendasi

1. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan mediasi perlu adanya pelatihan mediator bagi para hakim secara merata.
2. Untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan perlu secara terus menerus dilaksanakan pelatihan dan peningkatan ketrampilan, untuk itu perlu dilakukan pengusulan diklat terhadap SDM Teknis dan Non Teknis.
3. Untuk peningkatan sarana dan prasarana apartur Pengadilan Agama Muara Enim perlu dilakukan perencanaan dan usul yang matang terhadap penyusunan anggaran belanja satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim (RKA-KL).

LAMPIRAN



**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

NOMOR : W6-A5/1507/OT.01.2/XII/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyeleksi bahan laporan, menyusun narasi dan mengoreksi konsep laporan sehingga dapat dibuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran sesuai dengan *outline* yang ditentukan;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2020 Pengadilan Agama Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1939A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyusunan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM.
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim bertugas :
 - 1) Mengumpulkan dan menyeleksi bahan laporan, menyusun narasi dan mengoreksi konsep laporan sehingga dapat dibuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akurat, lengkap dan tepat sasaran sesuai dengan *outline* yang ditentukan;
 - 2) Memastikan finalisasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Minggu ke tiga bulan Januari 2020;
 - 3) Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja maupun rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Pokja Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim; dan
 - 4) Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim bertugas terhitung mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim selaku Penanggung Jawab Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Muara Enim.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Enim.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim

Pada tanggal : 15 Desember 2020

Ketua,




Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor : W6-A5/1507/OT.01.2/XII/2020
Tanggal : 15 Desember 2020
Tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja)
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun
2020 Pengadilan Agama Muara Enim

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Penanggung Jawab	: Drs. Husaini, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Muara Enim)
Koordinator	: Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim)
Sekretaris	: Syam Ratulangi, S.H. (Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim) Drs. Suratman Hardi (Panitera Pengadilan Agama Muara Enim)
Bagian Pengawasan Anggota	: H. Tamim, S.H. (Hakim) Hj. Sabariah, S.Ag, S.H. (Hakim) Yeni Kurniati, S.H.I. (Hakim)
Bagian Peningkatan Pelayanan Publik Anggota	: Weri Siswanto BAD, S.H.I. (Hakim) Suprayogi Pamungkas, S.H. (Jurusita)
Bagian Manajemen Perkara Anggota	: Rendy A, S.H.I. (Panitera Muda Gugatan) Firdaus, S.H.I. (Panitera Muda Hukum) Fanani (Jurusita) Kaim Nahrudin, S.H. (Jurusita) Arjuni, S.H. (Honorar/Staf Pamud Hukum) Diana Caesarianti, A.Md. (Honorar/Staf Panmud Gugatan)
Bagian SDM	: Yeni Puspita, S.Ag. (Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
Anggota	: Zayan Rohanda, S.H. (Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)

Bagian Keuangan dan Sarana : Rahmi Oktaria, S.H.I.
Prasarana (Kasubbag Umum dan Keuangan)
Anggota : Ary Puspita Yudha, S.T.
(Staf Umum dan Keuangan)

Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan : Azuardi Rizal, S.S.I.
(Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan)
Anggota : Nopriyansyah, S.Kom
(Honorar/Staf TI)



Ketua,

Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 196812191994031001

Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB



Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH No. 1
Muara Enim - 31312



(0734) 7420107, 7420108



pa.muaraenim@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

